

e-news letter

FEB III 2020

# PKSPARLEMEN

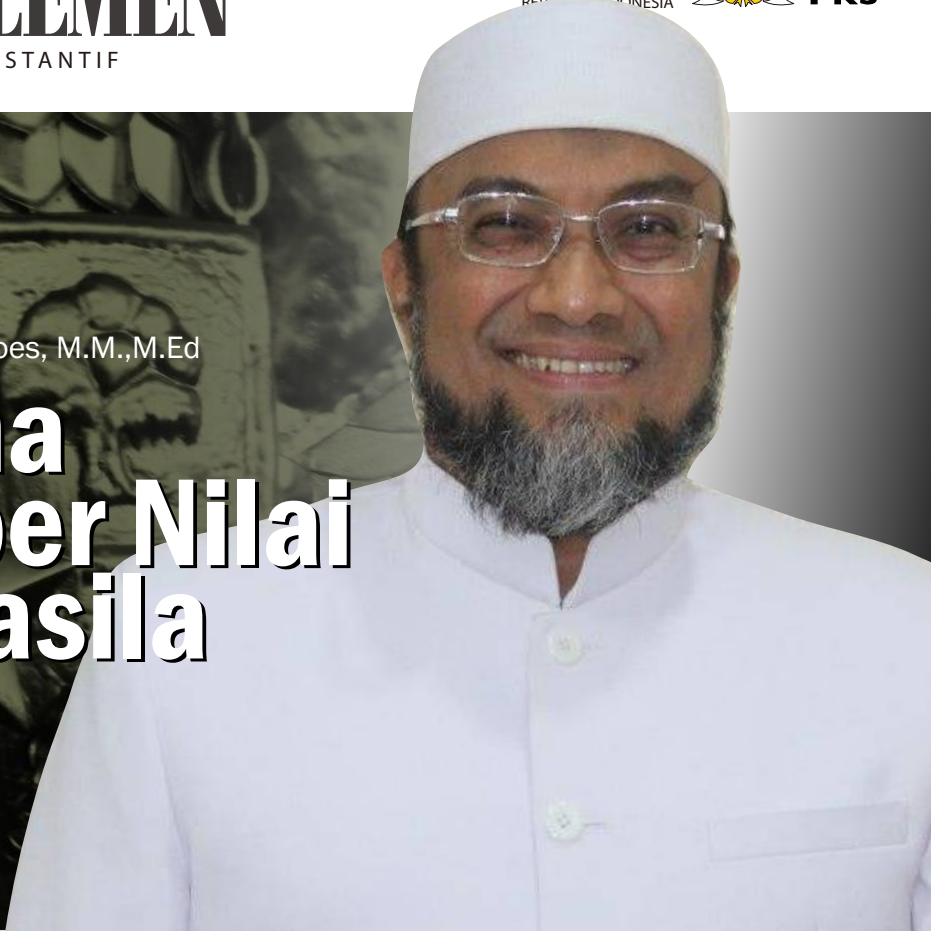
KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed

# Agama Sumber Nilai Pancasila



# “Pancasila Mati di Lumbung BPIP”

Jangan berharap sebuah lembaga akan mampu menerapkan Pancasila, jika pada akhirnya pangkal sosok menegaskan nilai yang ada di dalamnya. Terlebih nilai tersebut sangat dominan dan relevan. Apalagi diterapkan tanpa code of conduct dan code of being yang memadai

Lumbung dalam konsep kearifan lokal adalah tempat menaruh harapan dan persediaan, karena disana ada banyak stok makanan yang disimpan agar berguna dimasa pakeklik. Sebuah pepatah lawas saat ini, "Tikus Mati di Lumbung Padi" nampak relevan untuk menggambarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga relatif baru hasil besutan Presiden Jokowi, yang digadang-gadang sebagai "lumbung Ideologi" untuk menggali dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Ternyata situasinya seperti tuna sejarah dan pakeklik nilai dalam memahami falsafah negara ini.

Tetiba Ketua BPIP Yudian Wahyudi, menjadi pemantik kontroversi dengan mengatakan

bahwa Agama dalah musuh Pancasila. Dor !! Rasanya nalar kita sebagai warga bangsa berhenti berkerja dan nurani jadi terseok-seok. Mengapa orang yang diberi otoritas membimbing kepada Pancasila, tidak paham dengan isi dan akar ideologi negara tersebut : Agama. Pertanyaan dasar mengemuka, mengapa Agama dinegasikan dengan Pancasila oleh Ketua BPIP ? Tidak perlu menjadi pintar atau cerdas untuk memahami bahwa Agama menjadi narasi utama pembentukan Pancasila. Apakah Ketua BPIP seperti tidak mentelusuri bahwa Pancasila dan seluruh silanya merupakan cerminan dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Rasanya tidak mungkin

beliau tidak tahu, begawan ilmu tentu paham alur dan metodologi. Ucapannya seperti ironi, "entah apa yang merasukimu".

Sesal terhadap lembaga ini sesungguhnya bisa ditelusuri sejak awal, bertambah-tambah dengan apa yang dilakukan oleh Yudi Wahyudi. Akademisi yang dalam sejarah studinya sebagai Ketua Sidang ujian terbuka disertasi sempat "melegalkan" hubungan suami istri tanpa harus ada ikatan pernikahan. Kala itu memantik reaksi dan kecaman publik luas, meski kemudian dirinya tergopoh-gopoh mengklarifikasi. Persis pola dan laku lampahnya seperti hari ini. Tapi aneh bin ajaib Presiden Jokowi memilih beliau sebagai Ketua BPIP. Rekomendasi Fraksi PKS DPR RI jelas dan tegas terhadap beliau sebagai Ketua BPIP. "Agama musuh Pancasila", pecat Ketua BPIP!. Sungguh keputusan Presiden ditunggu, jika kemudian diabaikan hingga lalai ditelan waktu. cukup tahu aja.

Jangan berharap sebuah lembaga akan mampu menerapkan Pancasila, jika pada akhirnya pangkal sosok menegaskan nilai yang ada di



dalannya. Terlebih nilai tersebut sangat dominan dan relevan. Apalagi diterapkan tanpa code of conduct dan code of being yang memadai.

Rasanya kita ingin bertanya bagaimana komitmen lembaga ini dalam memperkuat pemberantasan korupsi, ditengah kangkangan pengaruh politik yang sangat terang benderang. Bagaimana skema penuntasan skandal keuangan Jiwasraya yang sangat mengusik rasa keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana oligarki kekuasaan menjadi hilir dalam seluruh simpul dan proses Demokrasi di negeri ini, tanpa permusyawaratan yang penuh hikmah. Hingga akhirnya menggurita lobby dan negosiasi gelap.

Rumitnya BPIP saat ini seakan diperankan untuk mengaburkan dan menenggalkan tema-tema krusial tersebut. Entahlah.

Humas Fraksi PKS DPR RI.

Banyak kalangan mengecam pernyataan Ketua BPIP Yudian Wahyudi yang mempertentangkan Pancasila dengan Agama. banyak kalangan menilai pernyataan itu sangat tendensius, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Fraksi PKS sebagai partai Islam tentu saja tidak bisa tinggal diam dengan hal ini.

# AGAMA

## Sumber Nilai Pancasila, bukan Musuh



Dampak ucapan Kepala BPIP ini berlawanan dengan apa yang sudah dan sedang diupayakan Kepala BIN

yaitu rekonsiliasi paska pilpres dan menghindarkan Bangsa dari keterbelahan

**SUKAMTA**

Kepala BPIP harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement, apalagi ketika menyinggung perkara agama.

**BUKHORI  
YUSUF**

Pancasila menjadi acuan bagi semua anak bangsa untuk hidup bersama dalam spirit nilai-nilai agama yang diyakini.

Tidak perlu lagi mempertentangkan Pancasila dan Agama

**FAHMY  
ALAYDROES**

secara yuridis, pernyataan Kepala BPIP ini memenuhi delik penodaan agama / penistaan agama

Pasal 156 huruf a KUHP ini sesungguhnya bersumber dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965

**ALMUZZAMMIL  
YUSUF**

BPIP dibentuk bukan untuk bikin gaduh dengan mengumbar narasi yg tak sesuai dengan klaim berpancasila

BPIP dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pematapan ideologi pancasila,

**HIDAYAT  
NUR WAHID**



# Agama itu Sumber Nilai Pancasila, bukan Musuh!

Pancasila menjadi acuan bagi semua anak bangsa untuk hidup bersama dalam spirit nilai-nilai agama yang diyakini. Tidak perlu lagi mempertentangkan atau memperdebatkan antara Pancasila dan Agama

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar V

Jakarta (13/2) Anggota DPR RI Famy Alaydroes mengemukakan pernyataan Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi yang mempertentangkan Pancasila dengan Agama. Fahmy menilai pernyataan yudian tendensius, tidak masuk akal, dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Yudian tidak memahami hubungan Pancasila dan Agama, sehingga mengeluarkan pernyataan provokatif tersebut. Pandangan irasional dari ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila itu yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama justru memperkeruh situasi dan kondisi keumatan. Pernyataan dia tendensius

kepada agama Islam." disampaikan Fahmy dalam keterangan Pers pada hari Kamis (13/2) di Jakarta.

Anggota Legislatif Dapil Kabupaten Bogor, Pancasila adalah dasar negara dan merupakan resultante perdebatan panjang dan sangat argumentatif serta penuh dengan semangat kebangsaan.

"Pancasila menjadi acuan bagi semua anak bangsa untuk hidup bersama dalam spirit nilai-nilai agama yang diyakini. Tidak perlu lagi mempertentangkan atau memperdebatkan antara Pancasila dan Agama" tegasnya.

Fahmy sangat menyesalkan Pernyataan dan pandangannya aneh, ahistoris

dan justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

Padahal, lanjut dia, Pancasila lahir dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Bahkan, Pancasila menjadi landasan yang kokoh bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya.

Pernyataan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kenyataannya, tidak ada yang memaksakan kehendak, tidak ada yang melabrak nilai-nilai Pancasila, bahkan berkumpul dan menyatakan pendapat, mendukung salah satu pihak dalam kontestasi politik itu semua wujud dari demokrasi yang dilindungi Konstitusi dan sesuai spirit Pancasila.

Sebelumnya, seperti dilansir media online nasional, Yudian menyebut bahwa belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentinganya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang



disokongnya mereka pun kecewa.

"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," papar Yudian sebagaimana diungkap di berbagai media. Sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya, ia melanjutkan, NU

dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak.

Meskipun sudah diklarifikasi dan diluruskan, publik sudah terlanjur kecewa dan menyelesaikan pernyataan tersebut. Tidak layak dia duduk sebagai ketua BPPI.

# HNW: Agama Bukan Musuh Pancasila

“BPIP dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pematapan ideologi pancasila, bukan untuk membuat gaduh dengan mengumbar narasi kontroversial yang tak sesuai dengan klaim berpancasila seperti dengan mempermasalahkan agama secara general dan menyebutnya sebagai musuh Pancasila

## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (13/20) Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid menyalahkan pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bahwa “musuh terbesar pancasila adalah agama”, sekalipun sudah diklarifikasi, tapi klarifikasinya pun masih menisakan masalah mendasar terkait relasi Agama dan Pancasila, serta kejujuran dalam klaim dan pengamalan Pancasila.

Hiidayat menilai bahwa dengan pernyataannya itu, Yudian menampilkan

pemahaman sejarah bangsa Indonesia yang tidak utuh, dan cenderung tidak rasional dengan mempertentangkan antar Agama dan Pancasila. Padahal, Agama merupakan salah satu sumber utama dari Pancasila, malah disepakati sebagai sila 1 dari Pancasila. “Pernyataan radikal Ketua BPIP itu ahistoris dan irasional,” tegas pria yang akrab disapa HNW ini melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/2).

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa di era Orde Lama dan Orde Baru, dan presiden-presiden Indonesia

terdahulu tidak pernah memosisikan agama memusuhi pancasila, atau mempertentangkan antara agama dan pancasila. “Presiden Sukarno dan Suharto tidak pernah menjadikan agama sebagai musuh pancasila. Seharusnya Ketua BPIP membaca dan mengkaji pokok pemikiran para presiden Indonesia tentang relasi agama dan Pancasila,” ujarnya.

Bahkan, lanjut HNW, Presiden Soekarno berulangkali memuliakan posisi Agama terkait hubungannya dengan Pancasila di berbagai kesempatan, seperti saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Sembilan maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). “Fakta-fakta sejarah seperti ini seharusnya dipahami dengan baik apalagi oleh pihak yang bertugas membina dan memantapkan ideologi Pancasila,” ujarnya.

“BPIP dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pematapan ideologi pancasila, bukan untuk membuat gaduh dengan mengumbar narasi kontroversial yg tak sesuai



dengan klaim berpancasila seperti dengan mempermasalahkan agama secara general dan menyebutnya sebagai musuh Pancasila. Memahami secara lebih baik dan menyeluruh secara benar sejarah dan dinamika relasi antara tokoh-tokoh bangsa, agama dan

pancasila, harusnya menjadi prioritas agar BPIP bisa melaksanakan tugas secara baik & benar sebagaimana seharusnya, sesuai dengan spirit awal dibentuknya BPIP”. Pungkas HNW yg juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

# Tiga Kesalahan Fatal Kepala BPIP, mengatakan Agama musuh terbesar Pancasila

Pernyataan Kepala BPIP yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama sangat naif, provokatif, dan menyesatkan

**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si**

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (12/2) Anggota DPR RI Fraksi PKS Almuzammil Yusuf mengemukakan keras pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Menurut Muzzammil, pernyataan Kepala BPIP ini justru menginjak-injak nilai Pancasila dan dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Pernyataan Kepala BPIP yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama sangat naif, provokatif, dan menyesatkan." Tegas Anggota Komisi I DPR RI ini di Jakarta, 12/2/2020.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Polhukam ini ada tiga aspek kesalahan fatal dari pernyataan Kepala BPIP.

"Pertama, secara filosofis

kenegaraan, Pancasila itu sendiri mengandung sila pertama yang sangat menghormati eksistensi agama. Dikuatkan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 pasal yang mengatakan (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Paparnya

Selain itu, kata Muzzammil Wakil Ketua Fraksi MPR RI, TAP MPR RI No.VI/ MPR /2001 tentang Etika Berbangsa, hasil reformasi masih berlaku, menegaskan arah kebijakan bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan

pribadi keluarga masyarakat bangsa dan negara.

"Kedua, secara historis bangsa ini didirikan oleh perjuangan darah, nyawa dan airmata para ulama dan tokoh agama untuk memerdekakan dan menjaga kemerdekaan bangsa."

Anggota Legislator Dapil Lampung memaparkan sejumlah contoh, seperti peristiwa Hari Pahlawan dengan Takbir Bung Tomo yang bersejarah dalam menggerakkan arek-arek Suroboyo mengusir tentara penjajah Inggris dengan korban mati syahid lebih dari 20.000 orang.

Ketiga, kata Muzzammil, secara yuridis, pernyataan Kepala BPIP ini memenuhi delik penodaan agama / penistaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini sesungguhnya bersumber dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun berangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan



buatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

"Pernyataan Kepala BPIP ini tidak saja menghina satu agama, tapi ia telah menghina eksistensi semua agama yang sah di Indonesia." Tegasnya

Alumni Ilmu Politik ini menanyakan kepada Presiden Jokowi, apakah orang seperti ini patut dipercaya sebagai Kepala BPIP?

"Lebih mendasar lagi pertanyaan saya, apakah ucapan ini merupakan bagian tugas dari BPIP? Pernyataan Kepala BPIP ini justru menginjak-injak nilai Pancasila." Tegasnya

Menurut Muzzammil, jika yang bersangkutan, dianggap Presiden Jokowi telah menyalahi dan menodai tugas

mula BPIP maka segera berhentikan yang bersangkutan.

"Jika menurut Presiden Jokowi tidak bertentangan, maka Presiden Jokowi harus turut mempertanggungjawabkan pernyataan Kepala BPIP yg baru dilantik 5 Februari lalu." Terangnya.

Muzzammil menegaskan NKRI harga mati, Pancasila ideologi Negara kita, Pancasila memuliakan agama, dan seorang Pancasilais menjaga Persatuan Indonesia, bukan dengan malah mengeluarkan pernyataan yang memecah belah bangsa.

"Mari kita tegakkan hukum dengan adil karena Indonesia adalah negara hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3." Tegasnya.

Foto : dpr.go.id

# Sukamta: BPIP Stop Buat Kegaduhan!

ini jelas ucapan yang ngawur dan juga menyesatkan. Secara historis, yuridis, filosofis dan sosiologis Pancasila bermuatan nilai-nilai agama, karena sejak awal para perumusya memahami arti penting agama bagi masa depan Indonesia. Presiden perlu menegur yang bersangkutan, jika perlu ditinjau ulang keanggotaan dan posisinya di BPIP, meski sudah meluruskan pernyataannya”

## H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

Terkait pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi yang beberapa waktu yang lalu menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam, Sukamta meminta pejabat pemerintah untuk menghentikan kebiasaan membuat pernyataan yang membuat gaduh.

“Sudah berulang kali pejabat pemerintah membuat opini yang membuat gaduh. Sebelum ini Pak Menteri Agama

berwacana soal pemulangan eks WNI yang terlibat ISIS. Sebelumnya lagi soal radikalisme, larangan celana cingkrang dan juga cadar. Semua tadi membuat gaduh di media sosial dan juga di tengah masyarakat, menjadi bahan saling menyerang, saling nyinyir dan bahkan muncul aneka hoaks. Ini bisa menjadi energi negatif yang berbaya bagi persatuan bangsa.” jelas Sukamta.

Sukamta juga menilai dampak ucapan Kepala BPIP

yang membuat gaduh ini berlawanan dengan apa yang sudah dan sedang diupayakan Kepala BIN, yaitu rekonsiliasi paska pilpres dan menghindarkan Bangsa dari keterbelahan.

“Jadi ini jelas ucapan yang ngawur dan juga menyesatkan. Secara historis, yuridis, filosofis dan sosiologis Pancasila bermuatan nilai-nilai agama, karena sejak awal para perumusya memahami arti penting agama bagi masa depan Indonesia. Presiden perlu menegur yang bersangkutan, jika perlu ditinjau ulang keanggotaan dan posisinya di BPIP, meski sudah meluruskan pernyataannya” pinta Sukamta.

Lebih lanjut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini menyayangkan berbagai persoalan penting malah tidak diangkat oleh pemerintah seperti soal kebijakan impor berbagai komoditas pangan yang merugikan petani dan peternak, soal kenaikan iuran BPJS, serta perlambatan ekonomi yang sedang berlangsung.

“Kami dengar Kementerian Perdagangan di



tahun 2020 ini berencana naikkan kuota impor garam menjadi 2,92 juta ton, padahal kebijakan tersebut selama ini dianggap merugikan petani garam rakyat. Sementara impor beras, jagung, kedelai dan daging sapi juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Jika seperti ini,

kapan Indonesia akan swa-sembada pangan. Jadi sekali lagi stop membuat kegaduhan, mari buat energi positif untuk hadirkan kesejahteraan rakyat,” kata Sukamta

Foto : dpr.go.id

# PKS Kritik Tajam Pernyataan Kepala BPIP Soal Pancasila dan Agama

“Kepala BPIP harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement, apalagi ketika menyinggung perkara agama. Adalah hal yang tidak tepat membenturkan agama dengan Pancasila mengingat kedua konsep tersebut adalah hal yang saling menunjang dalam mewujudkan ketahanan ideologi bangsa”

## KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta - Anggota DPR RI fraksi PKS Bukhori meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi dipecat oleh presiden. “Pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama dinilai sebagai sebuah pernyataan yang berbahaya” ungkap Bukhori.

Bukhori mengatakan pernyataan Kepala BPIP mengusik rasa keberagaman mayoritas masyarakat Indonesia yang memandang bahwa agama (sila pertama) adalah bagian integral dari ideologi Pancasila.

“Kepala BPIP harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement, apalagi ketika menyinggung perkara agama. Adalah hal yang tidak tepat membenturkan agama dengan Pancasila mengingat kedua konsep tersebut adalah hal yang saling menunjang dalam mewujudkan ketahanan ideologi bangsa” kata Bukhori

Hal tersebut disampaikan oleh legislator DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung parlemen Senayan bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh

(PHU) Kementerian Agama, Rabu (12/2).

Menurut Bukhori, secara historis kelompok agama telah memainkan peran penting dalam perumusan Pancasila pada awal berdirinya republik sehingga pandangan yang melihat agama sebagai musuh Pancasila adalah sikap yang ahistoris.

Oleh karena itu, Bukhori meminta agar Yudian Wahyudi menarik pernyataan tersebut dan segera meminta maaf atas polemik yang ditimbulkan.

Polemik ini bermula dari wawancara Kepala BPIP dengan salah satu media. Dalam salah satu pernyataannya ia mengatakan bahwa terdapat kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan mereka sendiri dengan nilai-nilai yang tidak selaras dengan Pancasila.

“Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi, kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” pungkas Yudian.





## المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

The International Islamic Forum of Parliamentarians

جاكرتا، إندونيسيا، الخميس-السبت 19-21 جمادى الثاني 1441 هـ  
(الموافق ل 13-15 فبراير 2020 م)

People's struggle  
for freedom  
and reform



فَضَالَاتِ الشَّعُوبِ  
مَنْ أَجَلَ تَمَتُّوا وَإِصْلَاحِ

السبت 21 الأهر 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م - جاكرتا، إندونيسيا  
by: the 21th jamada al-thani, 1441 correspondi  
ia  
om  
www.iifp.org

### Peran strategos IIFP bagi Perdamaian Dunia

Sejarah IIFP itu sangat istimewa bagi Indonesia. Semangatnya saat itu adalah anggota parlemen muslim di seluruh dunia dapat berbagi pandangan dan pengalaman serta bekerja sama erat dalam menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia melalui peran-peran kolektif parlemen

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI / Wakil Ketua IIFP



# Poin Kesepahaman IIFP ke-4

Sejumlah kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan IIFP ke-4 antara lain

المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

The International Islamic Forum of Parliamentarians

جاكرتا، إندونيسيا، الخميس-السنبت ١٩-٢١ جمادى الثاني ١٤٤١ هـ  
الموافق ل ١٠-١٣ فبراير ٢٠٢٠ م



- 1** IIFP akan terus memperluas keanggotaannya dengan aktif berkomunikasi dan berkirim surat resmi kepada anggota parlemen muslim khususnya di negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Eropa dan Amerika. Hal ini dimaksudkan agar perspektif dan kontribusi IIFP semakin luas dan dirasakan dunia.
- 2** Anggota IIFP berkomitmen untuk mempromosikan dan menampilkan wajah Islam yang ramah, bersahabat, dan berkemajuan dalam interaksi dan

peran-peran parlemen khususnya sehingga benar-benar mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin.

- 3** melalui peran-peran parlemen, IIFP terus mendorong upaya perdamaian dunia di wilayah-wilayah yang berkonflik serta menunjukkan keberpihakan dan kepedulian atas permasalahan kemanusiaan universal yang menimpa masyarakat dunia terutama kepada masyarakat dan bangsa yang tertindas seperti di Palestina, Rohingya, dan Uighur.

- 4** IIFP mendorong agenda perbaikan atau reformasi pemerintahan dan pelayanan publik juga pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan dan pencapaian kemajuan peradaban di negara masing-masing dan dunia internasional. Dalam hal ini, anggota IIFP berusaha menjadi yang terdepan (menjadi teladan) dalam mewujudkannya melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja parlemen.

## Forum Perlemen Muslim Internasional ke-4

# Keberpihakan Pada Isu-Isu Kemanusiaan, Kesejahteraan, dan Perdamaian Dunia



المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين  
The International Islamic Forum  
for Parliamentarians

Jakarta (16/2) - Penyelenggaraan pertemuan International Islamic Forum of Parliamentarians (IIFP) ke-4 yang dihelat sejak 13 Februari berakhir hari ini (Sabtu, 15/2). Fraksi PKS DPR RI selaku tuan rumah mengucapkan selamat dan berharap hasil-hasil yang dicapai dapat memperkuat peran IIFP dalam memperkuat kerjasama antarpellemen dan dunia internasional.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang juga Wakil Ketua IIFP dalam penutupan acara menerima ucapan terima kasih dan apresiasi dari Ketua IIFP Dr. Abdul Majid Menasrah (Aljazair).

"Terima kasih kepada Fraksi PKS atas kepatihan acara yang dinilai berhasil optimal dan kepada Indonesia

atas keramahannya dalam menyambut delegasi IIFP dari negara-negara peserta. Semua fasilitasi dan keramahan itu membuat IIFP merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih," ungkap Abdul Majid.

Jazuli Juwaini menjelaskan IIFP dicetuskan di Indonesia pada 2007 yang saat deklarasi dihadiri delegasi anggota parlemen dari 28 negara dan diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sejarah IIFP itu sangat istimewa bagi Indonesia. Semangatnya saat itu adalah anggota parlemen muslim di seluruh dunia dapat berbagi pandangan dan pengalaman serta bekerja sama erat dalam menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia melalui peran-peran kolektif parlemen," terang Jazuli.

Oleh karena itu, Fraksi PKS selaku panitia dan tuan rumah punya tanggung jawab moral untuk kembali merevitalisasi peran IIFP sebagai forum yang berkontribusi bagi kemasyarakatan dunia.

"Selama tiga hari penuh

anggota parlemen muslim yang hadir bertukar pikiran tentang isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Disamping itu kita juga membahas isu-isu demokratisasi, reformasi, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup," tandas Jazuli.

**Poin Kesepahaman IIFP ke-4** Sejumlah kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan IIFP ke-4 antara lain:

**Pertama**, IIFP akan terus memperluas keanggotaannya dengan aktif berkomunikasi dan berkirim surat resmi kepada anggota parlemen muslim khususnya di negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Eropa dan Amerika. Hal ini dimaksudkan agar perspektif dan kontribusi IIFP semakin luas dan dirasakan dunia.

**Kedua**, anggota IIFP berkomitmen untuk mempromosikan dan menampilkan wajah Islam yang ramah, bersahabat, dan berkemajuan dalam interaksi dan peran-peran parlemen khususnya sehingga benar-benar mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin.



**Ketiga**, melalui peran-peran parlemen, IIFP terus mendorong upaya perdamaian dunia di wilayah-wilayah yang berkonflik serta menunjukkan keberpihakan dan kepedulian atas permasalahan kemanusiaan universal yang menimpa masyarakat dunia terutama kepada masyarakat dan bangsa yang tertindas seperti di Palestina, Rohingya, dan Uighur.

**Keempat**, IIFP mendorong agenda perbaikan atau

reformasi pemerintahan dan pelayanan publik juga pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan dan pencapaian kemajuan peradaban di negara masing-masing dan dunia internasional. Dalam hal ini, anggota IIFP berusaha menjadi yang terdepan (menjadi teladan) dalam mewujudkannya melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja parlemen.



## المشتمدى الإسلامى العالمى للبرلمانيين

The International Islamic Forum of Parliamentarians

جاكرتا، إندونيسيا، الخميس-السبت ٢١-١٩ جمادى الثاني ١٤٤١ هـ  
(الموافق ل ١٥-١٣ فبراير ٢٠٢٠ م)

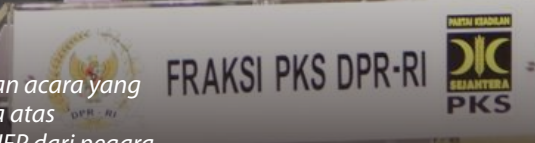


### **Terima Kasih Fraksi PKS**

*Terima kasih kepada Fraksi PKS atas kepanitian acara yang dinilai berhasil optimal dan kepada Indonesia atas keramahannya dalam menyambut delegasi IIFP dari negara-negara peserta. Semua fasilitas dan keramahan itu membuat IIFP merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih*

### **Dr. Abdul Majid Manaserah**

*Ketua IIFP (The International Islamic Forum of Parliamentarians)*



# Jazuli: IIFP Harus Aktif Ajak Anggota Parlemen Muslim di Negara Non Muslim.



المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين  
The International Islamic Forum  
for Parliamentarians

Jakarta (13/2) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Pengurus International Islamic Forum of Parliamentarians (IIFP) untuk dapat berperan aktif dalam mendorong anggota Parlemen Muslim dari negara-negara Mayoritas penduduk Non muslim.

"Kami meminta Ketua dan Sekretaris IIFP mengirimkan surat kepada anggota parlemen yang beragama Islam di negara-negara yang mayoritas non muslim. Kita ajak mereka bergabung di lembaga ini untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin dan sesuai

dengan nilai-nilai demokrasi agar betul-betul terasa manfaatnya dari lembaga ini" ujar Jazuli Juwaini saat berkunjung bersama delegasi ke Pimpinan MPR RI pada hari Kamis (13/2) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Jazuli menjelaskan, sebagaimana diketahui di Amerika Serikat saja saat ini punya beberapa anggota parlemen muslim, diantaranya politikus wanita seperti Ilhan Omar (36) dan Rashida Tlaib (42). Hal serupa terjadi di Belanda, Inggris, Jerman dan banyak negara lainnya. Tentu dengan keberadaan mereka di IIFP akan memberikan gambaran yang utuh tentang Islam.

"Anggota Parlemen Muslim dapat menjadi agent of change yang efektif dalam menyampaikan pesan dan nilai moral yang terkandung dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin" ulas Wakil Ketua IIFP ini.

Dirinya juga menyarankan kepada IIFP, lembaga yang dibentuk pada tahun 2007 di

Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini agar membangun komunikasi dengan sejumlah lembaga Internasional seperti PBB agar peran sertanya dapat dirasakan oleh dunia.

Anggota Parlemen Muslim dapat menjadi agent of change yang efektif dalam menyampaikan pesan dan nilai moral yang terkandung dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI / Wakil Ketua IIFP





# Sukamta: Peran Pemuda Sangat Strategis Bagi Negara



المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين  
The International Islamic Forum  
for Parliamentarians

Jakarta (13/2) Anggota DPR RI Komisi I Sukamta menegaskan bahwa pemuda saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam perpolitikan negara. Hal ini karena jumlah mereka yang sangat banyak dan peran mereka yang sangat dominan.

"2,3 miliar penduduk dunia saat ini berstatus milenial. Saat 2040 nanti hampir semua pekerjaan akan diambil oleh generasi milenial" ujar Sukamta dalam acara International Islamic Forum for Parliamentarians (IIFP) di Jakarta (13/2).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam ini, pemikiran milenial juga sangat berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya. Beliau memaparkan fakta bahwa dari sebuah survei, 50% generasi milenial lebih suka tidak punya pekerjaan ketimbang

melakukan pekerjaan yang tidak mereka sukai.

"Selain itu, mereka menginginkan pengakuan dan apresiasi terhadap yang mereka kerja. Mayoritas dari mereka juga ingin mengincar pekerjaan impian" jelas Sukamta.

Sukamta juga menambahkan bahwa mereka saat ini dominan di media sosial. Padahal, media sosial sangat berperan dan sering menjadi game-changer perubahan politik. "Jika kita lihat peta sosial media, hampir 90,4% milenial di seluruh dunia itu aktif di sosial media" ujar

Sukamta.

Oleh karena itu, pemuda adalah potential leader ke depan. Untuk bisa menjadikan anak-anak muda pemimpin politik, ada tiga konteks yang perlu diperhatikan

"Anak-anak muda itu harus hidup dalam institusi yang demokratis, masyarakat sipil yang kuat dan partai yang memiliki institusi yang demokratis. Jika semua terpenuhi, anak-anak muda akan berperan maksimal" jelas Sukamta.

Sukamta memberikan saran bagaimana anak-anak muda dapat terpilih sebagai pemimpin politik "Kita harus membina dan membangun kapasitas mereka. Selain itu, kita harus mengajak mereka tidak hanya memainkan peran politik tetapi juga peran sosial" pungkas Sukamta.



**H. Sukamta, Ph.D**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Anak-anak muda itu harus hidup dalam institusi yang demokratis, masyarakat sipil yang kuat dan partai yang memiliki institusi yang demokratis. Jika semua terpenuhi, anak-anak muda akan berperan maksimal"

# Toriq Hidayat: IIFP Forum Strategis Bagi Parlemen Indonesia



المنتدى الإسلامي للبرلمانيون  
The International Islamic Forum  
for Parliamentarians

Jakarta (13/2) Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyambut baik diadakannya Konferensi “ International Islamic Forum of Parliamentarians “ (IIFP) yang dihelat di Jakarta pada tanggal 13-15 Februari 2020.

“ Sebelumnya kegiatan ini dikenal dengan sebutan Konferensi IFIP, Namun pada konferensi ke 4 yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, bulan Desember 2018 lalu sebutannya jadi IIFP “ jelas Toriq.

IIFP adalah forum di mana anggota parlemen muslim dari benua Eropa, Asia, Afrika, juga Afrika, bertemu membicarakan sejumlah persoalan krusial yang melanda

negeri-negeri Islam khususnya, serta persoalan dunia umumnya.

Toriq mengatakan, “ Di antara persoalan yang akan menjadi bahasan pada pertemuan tersebut, antara lain islam dan Demokratisasi, Islam dan Ekonomi, Dialog Peradaban, juga Prioritas Reformasi Politik bagi Anggota Parlemen Islamis”

Dalam sejumlah pertemuan dengan para anggota parlemen negara sahabat, terutama dari Asia dan Afrika, umumnya mereka memuji proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia di era reformasi.

“ Indonesia adalah contoh nyata bahwa Islam tidak selalu berlawanan atau anti demokrasi sebagaimana yang dituduhkan sementara kalangan Barat.” tegas Toriq.

IIFP sangat penting bagi Indonesia. “ IIFP dapat meningkatkan wawasan dan posisi tawar Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia di mata

negara-negara peserta lainnya “, kata Toriq.

Selain secara politis, penyelenggaraan IIFP secara ekonomi, juga penting bagi Indonesia. Toriq menjelaskan, “ IIFP menjadi penting karena dapat dimanfaatkan pemerintah maupun pengusaha Indonesia untuk aktif menawarkan kerja sama investasi di Indonesia. Meskipun yang hadir adalah anggota parlemen, mereka dapat memberikan masukan kepada pemerintahnya ihwal peluang-peluang investasi tersebut “.

“ Dari sisi pengurangan tenaga pengangguran, forum ini juga penting. Kita tahu negara-negara Timur Tengah membutuhkan banyak Pekerja Migran dari Indonesia (PMI). Dalam forum ini bisa dipaparkan bahwa Indonesia juga memiliki banyak tenaga terlatih (skill labour), yang siap dikirim ke berbagai negara, termasuk Timur Tengah “, tambah Anggota Tim Pengawas Pekerja Migran DPR



**KH Toriq Hidayat, Lc**  
Anggota Komisi I DPR RI

IIFP menjadi penting karena dapat dimanfaatkan pemerintah maupun pengusaha Indonesia untuk aktif menawarkan kerja sama investasi di Indonesia. Meskipun yang hadir adalah anggota parlemen, mereka dapat memberikan masukan kepada pemerintahnya ihwal peluang-peluang investasi tersebut

RI ini.  
“ Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang paling penting dengan diadakannya Konferensi IIFP ini adalah selalu

terjalin tali ukhuwah dengan saudara-saudara muslim kami di seluruh dunia “, tutup Toriq Hidayat.

## **Pemerintah Jangan Anggap Enteng Penyebaran Virus COVID-19**

*Sebelum kejadian-kejadian buruk tersebut terjadi maka pemerintah harus serius dalam mencegah dan mempersiapkan segala kemungkinan serta terbuka dalam menyampaikan informasi terbaru tentang virus COVID-19 tanpa menunjukkan sikap menutup-nutupi kasus.*

**H. Sukamta, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

# Sukamta: Pemerintah Jangan Anggap Enteng Penyebaran Virus COVID-19

Sebelum kejadian-kejadian buruk tersebut terjadi maka pemerintah harus serius dalam mencegah dan mempersiapkan segala kemungkinan serta terbuka dalam menyampaikan informasi terbaru tentang virus COVID-19 tanpa menunjukkan sikap menutup-nutupi kasus.

## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (13/2). Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS meminta pemerintah jangan anggap enteng virus COVID-19 yang secara grafis terus meningkat. Pemerintah Indonesia harus segera membuat tim taktis pencegahan virus COVID-19

"Hari ini pemerintah Indonesia seakan-akan menganggap enteng masalah virus COVID-19. Kita hanya mendengar upaya pendeteksi virus di pintu gerbang-pintu gerbang kedatangan Internasional di bandara, pelabuhan. Peralatan

deteksi virus Corona di bandara dan pelabuhan hanya deteksi suhu dan ciri-ciri terduga pasien terjangkit virus Corona. Sedangkan alat yang akurat yang bisa mendeteksi virus Corona hanya di 3 tempat yaitu Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman dan Universitas Airlangga serta laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kesehatan RI. Jumlah yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia yang besar," papar

Sukamta, Kamis (13/2)

"Semenjak virus COVID-19 mewabah rakyat Indonesia tidak mendengar informasi bagaimana jika virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Langkah taktis strategis yang telah disiapkan pemerintah apabila virus sudah masuk ke Indonesia. Bahkan minimal informasi penyaluran kepada masyarakat tentang pencegahan, penanganan dan langkah-langkah penanggulangan dan pengobatan lainnya," jelas Sukamta.

"Hal tak kalah penting lainnya adalah ialah sosialisasi tentang virus COVID-19, bagaimana masyarakat menghadapinya, lalu informasi dari pemerintah tentang kesiapan negara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan virus Corona serta komunikasi dan penyaluran kepada masyarakat," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

"Apabila pemerintah mempersiapkan semua hal dalam menghadapi virus COVID-



19 ini, kemudian disampaikan kepada masyarakat bagaimana penanganannya maka ada ketenangan dari rakyat Indonesia. Jika tidak, apabila ada satu orang Indonesia positif terkena virus COVID-19 maka berdasarkan teori psikologi massa akan mudah sekali terjadi ketakutan massal yang menjalar dengan cepat dan bisa berakibat pada instabilitas kondisi negara, ancaman keamanan dan berpotensi menyebabkan kekacauan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus membuat antisipasi penyebaran virus dan kepanikan

masyarakat yang mungkin akan terjadi. Pemerintah seharusnya menyampaikan segala

kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana rencana penanganan oleh pemerintah," papar Doktor lulusan universitas Ratu Elisabeth ini.

Pernyataan Sukamta! ini berdasarkan grafik terbaru kasus virus Corona per Rabu (12/2) yang kini diberi nama Covid-19 telah menginfeksi 60,373 orang dengan 6,032 berhasil sembuh namun 1,369 meninggal dunia. Grafik perkembangan kasus dan jumlah kematian terus menanjak dengan tajam dan belum ada tanda-tanda adanya penurunan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# PKS: Kurangi Ketergantungan Impor Produk Pangan!

Saya berharap pemerintah mampu memberi kenyamanan pada masyarakat. Saat ini kepuasan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan tata niaga pangan masih rendah. Banyak keluhan yang saya terima dari masyarakat terkait stabilitas harga pangan ini

## **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta, (13/02/2020) – Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin meminta pemerintah agar mulai membenahi implementasi impor pangan yang terlalu dominan pada negara lain. Isu fluktuasi harga produk pangan yang kerap terjadi seperti daging, cabe maupun bawang putih yang baru-baru ini akibat penerapan kebijakan masa lalu yang terlalu tergantung pada satu negara yang terlalu dominan.

"Tiap daerah di negara kita punya potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan pada produksi pertanian atau peternakan. Tidak sepatutnya kita lemah dalam menghadapi kelangkaan produk pangan

yang seharusnya mampu kita produksi sendiri", ucap Hamid.

Politisi PKS ini mencontohkan pada daerah pemilihannya di Wonogiri yang memiliki lahan untuk sawah seluas 32.569 Ha (17,88%), lahan untuk tegal seluas 88.638 Ha (48,85%), lahan bukan pertanian seluas 37.925 Ha (20,82%), lahan Hutan Rakyat seluas 4.370 Ha (2,40%), dan lahan Hutan Negara seluas 17.662 Ha (9,69%).

Sedangkan di Karanganyar, berdasarkan data dinas pertaniannya, Beras, Jagung dan Kacang Tanah memiliki potensi sangat besar dengan luasan lebih dari 56 ribu hektar dengan kapasitas produksi 400 ton lebih.

Peternakan dan perikanan daerah karanganyar juga cukup besar seperti domba, ayam petelur dan budidaya ikan tawar.

Pada wilayah Sragen, lanjut Hamid, Kabupaten Sragen pernah mengalami surplus rata-rata 205 ribu ton beras pertahun. Dengan produktivitas tersebut maka Kabupaten Sragen dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, dengan potensi agraris yang cukup beragam dengan didukung oleh banyaknya penduduk di Kabupaten Sragen yang bekerja sebagai petani.

Selain itu kawasan pertanian di Kabupaten Sragen mempunyai prospek yang baik khususnya pertanian lahan basah, kondisi tersebut, karena didukung oleh adanya saluran irigasi teknis dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri serta adanya tujuh waduk di Sragen yakni Gebyar, Blimbing, Kembangan, Bothok, Brambang, Gembong, & Ketrow.

"Saya yakin setiap daerah punya kekhasan untuk dikembangkan sebagai daerah sentra pangan tertentu dan beragam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah pusat mesti mampu



menangkap semua peluang dari potensi - potensi di daerah kita. Semoga pengatur di tingkat pusat dapat tegas dalam idealismenya untuk membangun negara", Harap Hamid.

Legislator dari Jawa Tengah IV ini menyarankan kepada pemerintah, kalaupun mau impor produk pangan, jangan terlalu dominan pada satu negara saja. Pada Kasus bawang putih, dari 13 perusahaan

importir besar bawang putih, 10 perusahaan impornya pada satu negara saja, china. Akan ada produk-produk pangan strategis yang berpotensi berfluktuasi harganya bila tidak dikelola dengan baik seperti Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ketela, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Sorghum.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Prioritaskan Bawang Putih Lokal, Batasi Import Dari China

Segala kemungkinan bisa terjadi dengan merebaknya Virus Corona ini termasuk terjadi kelangkaan bawang putih yang saat ini hampir 97 persen kebutuhan nasional dipasok melalui impor. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah mengantisipasi kelangkaan bawang putih jika terjadi gagal impor dari China??

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (13/2) - Anggota DPR komisi IV, Johan Rosihan mengatakan Indonesia jangan terlalu tergantung pada satu negara ketika hendak bekerja sama pada satu produk komoditas pangan strategis. Dengan merebaknya virus Corona, pemerintah mesti mewaspadai kebijakan impor bawang putih dari China, sebab berdasarkan data Rekapitulasi RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) tahun 2020 terlihat ada 10 importir pemegang RIPH untuk komoditi bawang putih impornya berasal dari China. Adapun volume pengajuan importir bawang putih dari

China sebanyak 102.149 ton untuk Tahun 2020 ini.

"Segala kemungkinan bisa terjadi dengan merebaknya Virus Corona ini termasuk terjadi kelangkaan bawang putih yang saat ini hampir 97 persen kebutuhan nasional dipasok melalui impor. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah mengantisipasi kelangkaan bawang putih jika terjadi gagal impor dari China??", tanya Johan kepada Pemerintah.

Legislator PKS ini menerangkan bahwa saat ini harga bawang putih terus meroket, bahkan tembus harga

Rp 70.000 per kg di DKI Jakarta dan disinyalir kartel bawang putih akan bermain lagi demi keuntungan sesaat.

Saat ini, lanjut dia, kebutuhan bawang putih di Seluruh Indonesia sudah mencapai 47.758 ton per bulan. Berdasarkan data Kementan yang ia terima, stok bawang putih kita sekarang hanya tinggal 42.813 ton. Dengan kondisi ini, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengantisipasi kelangkaan stok bawang putih jika terjadi gagal impor dari China, serta pemerintah juga mesti punya strategi untuk menstabilkan lonjakan harga bawang putih yang terus meroket.

"Kelangkaan bawang putih ini akan menjadi salah satu penyebab inflasi. Apalagi sebentar lagi akan masuk moment Bulan Puasa dan Menjelang Lebaran dimana stok bawang putih yang ada sekarang diperkirakan hanya bisa bertahan sampai Bulan Maret 2020", tukas politisi PKS ini.

Politisi asal Sumbawa ini menjelaskan bahwa saat ini produksi bawang putih dalam negeri sekitar 85.000 ton per tahun dan pengembangan



produk bawang putih kita masih sangat terbatas. Hal ini menjadi sebab ketergantungan kita dengan impor dari China dalam rangka memenuhi kebutuhan bawang putih domestik. Menurut data BPS, sepanjang tahun 2019 lalu saja, kita mengimpor bawang putih sebanyak 582.994 ton dengan 99,6 persen berasal dari China. Semoga dengan adanya kasus ini (penyebaran virus Corona)

bisa menjadi penggerak pemerintah agar lebih serius meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri dan tidak sepenuhnya tergantung dengan impor.

"Meski saat ini komoditas berbasis tanaman tidak dikategorikan sebagai media pembawa virus Corona, namun pemerintah harus tetap waspada terhadap pasokan dari China termasuk impor bawang putih ini", pungkas Johan Rosihan.

# Slamet: Saatnya Kaji Pengelolaan Perikanan Bersama ASEAN di Laut Cina Selatan

Jika Zona Pengelolaan Perikanan Bersama di ZEEI Laut Cina Selatan telah disepakati, perjanjian ini akan memberikan rasa aman kepada nelayan Indonesia untuk menangkap ikan. Selain itu, kesepakatan ini akan meletakkan fondasi dimensi pertahanan maritim khususnya pada daerah batas laut antar Negara ASEAN yang pembahasannya masih terus berlangsung hingga sekarang

## drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (11/02). Anggota Komisi IV DPR drh. Slamet mengusulkan kepada Pemerintah agar dilakukan kajian kemungkinan menyepakati adanya Zona Pengelolaan Perikanan Bersama di ZEEI Laut Cina Selatan dengan negara-negara tetangga. Kesepakatan ini penting sebagai upaya kerja

sama mengelola potensi perikanan sekaligus solusi untuk mengurangi ketegangan di zona yang rawan potensi konflik tersebut.

"Sejauh ini perdebatan di zona tersebut berputar pada batas antar negara, persoalan hak kedaulatan. Kita perlu melihat persoalan ini melalui sudut pandang lain, khususnya

terkait manajemen perikanan", papar Slamet dalam keterangan tertulisnya (11/02)

Dari sudut pandang perikanan, menurut Slamet, ikan yang banyak terdapat di zona tersebut adalah jenis ikan pelagis. Ikan pelagis besar (tuna) dan pelagis kecil (cakalang, layang dan lain-lain) merupakan hewan transboundary spesies atau jenis ikan yang lintas batas. "Karena karakter ikannya seperti itu maka pengelolaannya juga perlu dilakukan secara lintas batas administratif negara", ucap legislator dari FPKS ini.

Kerjasama pengelolaan zona perikanan antar negara, lanjut Slamet, sudah banyak diterapkan oleh negara-negara zona batas lautnya beririsan misalnya Korea Selatan - Cina, Korea Selatan - Jepang dan Cina - Jepang. Selain itu, pada tahun 2012 Indonesia dan Malaysia juga menyepakati MoU terkait pedoman umum tentang penanganan terhadap nelayan oleh lembaga penegak hukum



di laut Republik Indonesia dan Malaysia yang kemudian dikuatkan kembali oleh Menteri Susi pada tahun 2019.

Menurut Slamet, jika Zona Pengelolaan Perikanan Bersama di ZEEI Laut Cina Selatan telah disepakati, perjanjian ini akan memberikan rasa aman kepada nelayan Indonesia untuk menangkap ikan. Selain itu, kesepakatan ini

akan meletakkan fondasi dimensi pertahanan maritim khususnya pada daerah batas laut antar Negara ASEAN yang pembahasannya masih terus berlangsung hingga sekarang. "Kepastian penegakan hukum akan tercipta terhadap kesepahaman yang sudah disepakati bersama "pungkas legislator dari Dapil Jabar IV ini.

# Harga Bawang Putih Naik Drastis Karena Isu Corona, Akmal: Ada Yang Bermain

Perekonomian kita ini sudah sangat rapuh. Jangan ada lagi segolongan orang yang mencoba membuat rakyat kita makin sengsara dengan mempermainkan harga komoditas yang dipakai masak

## **Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta, (11/02) – Tingginya harga bawang putih di pasaran yang mencapai Rp. 60.000.- / Kg mendapat perhatian Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin. Dia menuding ada pihak yang sengaja menimbun stok bawang putih.

"Tahun lalu kan kita sudah impor bawang putih cukup besar, dan ini mestinya masih ada 133 ribu ton bawang putih yang tersebar di gudang-gudang pedagang. Mestinya janganlah menahan-nahan stock ini demi mengerek harga dengan isu virus corona", tukas Akmal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (10/2).

Bahkan, Akmal melihat bahwa penghentian impor bawang putih ini harus tidak berdampak jangka pendek

melainkan jangka panjang. "Dalam jangka Pendek mestinya tidak terpengaruh karena stok masih ada berdasar data resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian" tegas Akmal.

Legislator PKS ini melanjutkan, tidak sewajarnya bawang putih ini naik dari harga rata-rata Rp 20.000/kilogram (kg), kini harganya bisa mencapai Rp 60.000/kg, bahkan hingga Rp 68.000/kg. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada hari Minggu (9/2/2020), merilis data harga bawang putih di Provinsi DKI Jakarta yang sudah mencapai Rp 68.350/kg, di Kalimantan Timur mencapai Rp 59.000/kg, dan di Yogyakarta mencapai Rp 58.750/kg.

"Perekonomian kita ini sudah sangat rapuh. Jangan ada lagi segolongan orang yang mencoba membuat rakyat kita makin sengsara dengan mempermainkan harga komoditas yang dipakai masak", tegas Akmal.

Politisi PKS ini menekankan kepada Kementan agar melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk aparat sehingga stok bawang putih yang ditahan dapat ditelusuri. Menurut Akmal, kenaikan bawang putih yang tinggi ini sengaja diciptakan dengan mempermainkan supply dan demand. Koordinasi dengan Bulog juga penting dilakukan agar segera melakukan operasi pasar. Para importir dan para pedagang besar harus dipaksa melepas stoknya sehingga ada penurunan harga yang menjangkau daya beli masyarakat.

"Penjarakan saja para pedagang yang sengaja menimbun stok bawang putih. Karena aktivitas para spekulan model begini yang selama ini merusak tatanan bernegara kita", tutup Andi Akmal Pasluddin.





PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAYAT  
REPUBLIK INDONESIA

di Omnibus Law Transportasi

## **PKS Perjuangkan SIM Seumur Hidup dan Pengembangan Teknologi Jalan**

*Kita telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR RI pada Selasa (11/02/2020) kemarin, yang membahas sejumlah prolegnas prioritas 2020 di komisi V dan khusus UU terkait transportasi dan Jalan yang telah masuk Prolegnas dan harus segera dibahas. Kita*

**H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A**

Anggota Komisi V DPR RI

Foto : dpr.go.id

di Omnibus Law Transportasi,

# PKS Perjuangkan SIM Seumur Hidup dan Pengembangan Teknologi Jalan

kita telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR RI pada Selasa (11/02/2020) kemarin, yang membahas sejumlah prolegnas prioritas 2020 di komisi V dan khusus UU terkait transportasi dan Jalan yang telah masuk Prolegnas dan harus segera dibahas

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (12/2). Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sedang membahas omnibus law bidang transportasi. Revisi undang-undang bidang transportasi ini penting dilakukan, sebab banyak aturan terkait transportasi yang dinilai tidak efektif dan tumpang tindih.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi, yang juga anggota Komisi V, saat dihubungi pada Rabu (11/02/2020) pagi menyampaikan bahwa omnibus law transportasi ini penting untuk dilaksanakan namun harus dikaji secara mendalam dan komprehensif, karena ini

menyangkut dunia transportasi baik darat, laut dan udara. Ada 2 UU bidang transportasi yang masuk dalam Prolegnas 2019, yaitu revisi UU nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dan revisi UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

"Alhamdulillah, kita telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR RI pada Selasa (11/02/2020) kemarin, yang membahas sejumlah prolegnas prioritas 2020 di komisi V dan khusus UU terkait transportasi dan Jalan yang telah masuk Prolegnas dan harus segera

dibahas. Kita telah memberikan beberapa catatan kepada Badan Keahlian. Nanti mereka akan melakukan kajian, Pembuatan NA dan draft RUU selanjutnya akan dibahas menjadi sebuah DIM Rancangan undang-undang "terang Syahrul Aidi.

PKS memberi perhatian lebih terhadap Revisi UU prioritas 2020 ini, khususnya UU nomor 22 tahun 2019 terkait LLAJ, yang terkait secara langsung dengan janji politik PKS saat Pemilu 2019 lalu tentang pemerlakuan SIM seumur hidup.

"Saat rapat kemarin, dari fraksi PKS, kita concern terhadap SIM. Kita telah memberi catatan kepada Badan Keahlian tentang beberapa kajian terkait SIM ini. Kita ingin nantinya badan keahlian melakukan kajian mendalam, setelah itu kita bahas di komisi atau Pansus nantinya." tambah pria yang dikenal dengan jargon Ustadz Kita di daerah pemilihannya.

Setidaknya ada 3 poin soal SIM yang disoroti oleh fraksi PKS, dan dijadikan bahan



pertimbangan Badan Keahlian DPR RI. Pertama, periodisasi SIM yang begitu pendek, yakni hanya 5 tahun. PKS berpikir bahwa khusus SIM C (Kendaraan roda 2), bisa lebih panjang, atau bahkan seumur hidup. Kedua nilai pendapatan negara. Ketiga perbandingan dengan negara lain, seputar

LLAJ.

"Kita berharap 3 poin ini dikaji oleh Badan Keahlian, dan mereka memberikan tawaran formulasi aturan dalam bentuk RUU" lugasnya

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

# Komisi VI Dorong UMKM Dapat Pembiayaan KUR Yang Masif

“Kontribusi total ekspor non migas saja bisa 14,17% dari sektor UMKM. Ini bukti bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan akan mampu memberi pemerataan yang baik dan menekan ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta – Anggota DPR Komisi VI, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah, melalui berbagai forum mitra DPR termasuk HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) agar terus aktif dan masif melakukan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada UMKM-UMKM di Indonesia. Ia berkeyakinan, berdasar data yang diperoleh, UMKM memberikan kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor.

“Dari tahun ke tahun kon-

tribusi sektor UMKM terhadap PDB terus meningkat menjadi 60,34%. Penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM ini juga tinggi, rerata 97,02%” ujar Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2). Hal ini karena pelaku UMKM merupakan bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, dan lain-lain.

Menurut Nevi, solusi mendasar bangsa kita untuk bangkit adalah dengan menguatkan sektor UMKM. Sumbangsih UMKM begitu

besar terhadap perekonomian Indonesia dengan ketahanan ekonomi yang stabil dan tinggi. “Kontribusi total ekspor non migas saja bisa 14,17% dari sektor UMKM. Ini bukti bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan akan mampu memberi pemerataan yang baik dan menekan ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia”, urai legislator Fraksi PKS tersebut.

Nevi melihat bahwa target total penyaluran KUR tahun 2020, dimana 60% penerimanya harus sektor produksi, merupakan target yang cukup baik. Sektor pertanian, pariwisata dan ekstraksi, misalnya, dapat menjadi prioritas realisasi KUR.

Terlebih lagi, pemerintah akan menurunkan suku bunga KUR menjadi 6% mulai 1 Januari tahun 2020. Selain itu, ada peningkatan plafon anggaran dari Rp140 triliun menjadi sekitar Rp190 triliun dan pinjaman KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta



per debitur. Perubahan juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan yang semula sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 juta. Untuk KUR Mikro sektor produksi, jumlahnya tidak dibatasi.

“Sesuai dengan kesepakatan fraksi, kami

mendorong pelaksanaan program KUR ini untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia terutama untuk usaha rintisan (start-up). Kedepannya, distribusi KUR dapat menyebar keseluruh wilayah Indonesia ,tidak lagi terkonsentrasi di Jawa” tutup Nevi Zuairina.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***PKS: Klaim BBM Satu Harga Tidak Sesuai Fakta***

*Pemerintah harus jujur mengenai klaim BBM satu harga. Jangan sampai di media bicara harga BBM sudah satu harga tapi fakta di lapangan harga masih berbeda-beda.*

***Dr. H. Mulyanto, M.Eng***  
*Anggota Komisi VII DPR RI*

Foto : [dpr.go.id](http://dpr.go.id)

# PKS: Klaim BBM Satu Harga Tidak Sesuai Fakta

Pemerintah harus jujur mengenai klaim BBM satu harga. Jangan sampai di media bicara harga BBM sudah satu harga tapi fakta di lapangan harga masih berbeda-beda.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, (13/2) - Klaim Presiden Joko Widodo yang berhasil menetapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga secara nasional ternyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya di beberapa wilayah harga BBM masih berbeda.

Semakin jauh suatu wilayah dari SPBU maka semakin mahal harga jual BBM yang berlaku. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Gedung Nusantara 1, Jakarta (12/2).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Pemerintah jujur mengenai klaim BBM satu harga. Jangan sampai di media

bicara harga BBM sudah satu harga tapi fakta di lapangan harga masih berbeda-beda.

Untuk itu Mulyanto minta BPH Migas meningkatkan pengaturan hilir migas secara lebih terpadu agar klaim tersebut bukan sekedar janji kosong.

Mulyanto minta Pemerintah melalui BPH Migas melakukan intervensi dengan berbagai pendekatan agar kebijakan BBM satu harga dapat terwujud. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya lembaga penyalur BBM kecil, termasuk sub-penyalur dan SPBU mini.

"Kasihannya masyarakat miskin di wilayah 3T, terluar, terdepan dan terpencil. Sudah

sulit dapat BBM, harganya mahal pula," tegas Mulyanto.

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas 170 lembaga penyalur BBM satu harga, BPH Migas perlu juga menambah jumlah jaringan penyaluran Sebab jumlah jaringan penyalur yang ada sekarang dinilai masih terlalu sedikit.

"Cakupan wilayah yang harus dilayani sangat luas. Jumlah kecamatan di wilayah 3T saja ada sekitar 1.600 kecamatan. Belum lagi kecamatan di wilayah lain yang tidak termasuk 3T tapi masih sulit akses kegiatan perekonomian," ujar Mulyanto.



# Saadiah Minta Dirjen Minerba Tagih Tunggakan PNPB Perusahaan Tambang

“Pastikan pengelolaan dan monitoring kegiatan IUP berjalan komprehensif terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PNPB kepada Negara”

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI

JAKARTA (11/02). Anggota Komisi VII DPR, Saadiah Uluputty, ST meminta agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM melakukan penagihan terhadap tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) oleh perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jumlah tunggakan PNPB tersebut bukan angka sedikit. “Akumulatifnya cukup signifikan, Kementerian ESDM menyebut besar tunggakannya sekitar Rp 2,5 Trilyun”, ujar Saadiah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, Selasa (11/2).

Menurut Saadiah, kewajiban penagihan atas tunggakan PNPB dimaksudkan untuk memastikan kewajiban perusahaan pertambangan kepada negara. Selain itu,

penagihan ini juga bertujuan untuk memonitor aktifitas usaha tambang yang dilakukan oleh perusahaan tambang dengan IUP tersebut.

Kendali Direktorat Minerba atas kegiatan usaha penambangan IU, sebut Saadiah, sangat penting. Hal ini karena sebaran dan jumlah IUP cukup banyak di berbagai daerah. “Semester I Tahun 2019, jumlah total Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sudah mencapai 3.139. Di antara jumlah tersebut, 2.595 berstatus IUP CnC atau Ijin Usaha Pertambangan Clean And Clear”, kata aleg PKS Dapil Maluku I tersebut.

Selain itu, Saadiah menyampaikan apresiasinya atas peningkatan capaian realisasi penerimaan PNPB Minerba yang terus meningkat triap tahunnya. Namun, ia

menyentil tata kelola usaha pertambangan terutama izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih carut marut.

“Hasil audit BPK semester I tahun 2019, ada kekurangan PNPB senilai Rp 223,46 miliar dan US\$20,81 juta”, beber Saadiah. Kekurangan ini disebabkan antara lain karena tunggakan 23 perusahaan batubara terhadap tagihan iuran tetap, royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) kepada negara.

Untuk itu, Saadiah meminta Dirjen Minerba segera melakukan penataan kegiatan IUP secara komprehensif lewat Minerba One Map Indonesia. “Pastikan pengelolaan dan monitoring kegiatan IUP berjalan komprehensif terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PNPB kepada Negara”, tandasnya.



## Antisipasi Virus Corona

# Mufida Kirim 10 Ribu Masker untuk Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Terdampak

Saya dengar para PMI kesulitan mendapatkan masker. Kalaupun ada, harganya melonjak. Bahkan sampai memesan ke tanah air

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Luar Negeri

HONGKONG – Banyak keluhan dari para Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong yang kesulitan mendapatkan masker akibat wabah virus Corona. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati merespons dengan mengirim bantuan 10 ribu buah masker ke wilayah terdampak, salah satunya Hong Kong.

“Saya dengar para PMI kesulitan mendapatkan masker. Kalaupun ada, harganya melonjak. Bahkan sampai memesan ke tanah air,” jelas Mufida yang berasal dari Dapil DKI Jakarta 2 (Jaksel, Jakpus

dan Luar Negeri) ini.

Di Hong Kong, kiriman masker dari Mufida telah tiba Minggu 9 Februari 2020. Para relawan Kurniasih Mufidayati dari kader-kader PKS Hong Kong membagikan langsung masker-masker tersebut kepada para PMI yang sedang berkumpul di Causeway Bay, Hongkong.

Tak hanya di Causeway Bay, bantuan masker ini juga didistribusikan ke wilayah lain, seperti Kowloon, Yunlong, dan distrik lainnya. Para PMI menyambut antusias bantuan masker tersebut.

Ghinda Aprilia, relawan PKS yang juga PMI di Hong

Kong, menyampaikan ucapan terima kasih dari rekan-rekannya sesama PMI di Hong Kong.

“Terima kasih Ibu Kurniasih Mufidayati sebagai aleg DPR RI yang telah perhatian dan empati atas apa yang kami rasakan di Hong Kong,” ujarnya.

Ghinda menambahkan, bahkan bukan hanya WNI yang menerima bantuan masker ini. Warga asli Hong Kong yang bekerja sebagai penjaga taman, petugas kebersihan, penjual di pasar juga menerima bantuan masker tersebut.

“Saat saya berikan masker bantuan Bu Mufida kepada orang Hong Kong, mereka sampai membungkuk-bungkuk hormat mengucapkan terima kasih berkali-kali,” tutur Ghinda.



**Kunjungi Natuna,**

# Netty minta KBRI di negara sebaran jempot bola mengecek kondisi WNI

Saya yakin Indonesia mampu mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan penanganan sampah dan barang infeksius juga sudah disiapkan dengan adanya mesin pemusnah sampah khusus sehingga tidak ada tumpukan sampah dan barang berbahaya. Mobile toilet juga tersedia

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta - Netty Prasetyani, Wakil Ketua FPKS DPR RI, ikut serta dalam rombongan Komisi IX ke Natuna untuk melihat secara langsung kegiatan penatalaksanaan observasi bagi 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (13/2). Dalam kesempatan tersebut rombongan Komisi IX yang didampingi Menkes Terawan Putranto dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Natuna juga melakukan video conference dengan WNI yang diobservasi terkait fasilitas, sarana, prasarana, aktivitas harian dan

perasaan mereka menjelang selesainya masa observasi.

Menurut Netty, "Persoalan observasi 'happy ending' setelah pada awalnya diwarnai oleh kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan penolakan yang disertai unjuk rasa." Netty mengapresiasi Pemkab dan masyarakat Natuna yang berlapang dada dan berbesar hati menerima kedatangan saudara sesama bangsa. "Itulah bentuk keindonesiaan Natuna dan kita semua, serta perasaan senasib sepenanggungan," tambahnya.

Menurut Netty kegiatan penatalaksanaan observasi

menjawab keraguan dunia akan kemampuan Indonesia menangani pasien virus Corona. "Saya yakin Indonesia mampu mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan penanganan sampah dan barang infeksius juga sudah disiapkan dengan adanya mesin pemusnah sampah khusus sehingga tidak ada tumpukan sampah dan barang berbahaya. Mobile toilet juga tersedia," jelas Netty.

Politisi PKS dari dapil

Kokab Cirebon dan Indramayu ini juga menyampaikan harapannya ke depan, "Upaya promotif dan preventif harus menjadi aktivitas unggulan sebagai benteng menghadapi penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Puskesmas harus membangun filosofi 'Puskesmas without wall' dengan mendasarkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, PIK Remaja, dan kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)."

Selanjutnya Netty meminta pemerintah memikirkan



kelanjutan penanganan WNI dari Wuhan pasca selesainya kegiatan observasi. "Sebagian besar mereka adalah mahasiswa. Banyak yang dari jurusan kedokteran. Perlu dipikirkan bagaimana kelanjutan studi mereka. Apakah dimungkinkan kembali ke Wuhan atau melanjutkan di tanah air," ujar Netty.

Dan yang tidak kalah penting, kata Netty, bagaimana kemampuan pemerintah menyelenggarakan penatalaksanaan observasi WNI dari lokasi endemik ini, dibarengi dengan upaya melindungi WNI yang ada di luar negeri khususnya yang menjadi

sebaran Covid 19. "Pemerintah perlu mengecek kondisi WNI di setiap negara sebaran Corona. Pastikan setiap KBRI siap membuka layanan cepat tanggap dan jika perlu jempot bola dengan menghubungi setiap WNI untuk mengetahui keadaan mereka," kata Netty

Sebagai penutup Netty mengajak masyarakat mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut agar di kemudian hari lebih tangguh dalam menghadapi setiap dinamika dan tantangan yang muncul dalam kehidupan.

Selengkapnya Kunjungi Fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## Catatan DPR Terkait Penyaluran Dana BOS

*Yang cukup berat terkait assesmen dan evaluasi pembelajaran. Apabila assesmen dilakukan dengan skill guru yang minimum menjadi pekerjaan rumah sendiri. Kemudi-an, pengembangan profesi guru dan tena-ga kependidikan. Biasanya kalau disekolah tuh belum terpikir untuk pengembangan. Karena selama ini kan pengembangan dari LPP, kemudian dari Dinas dan segala macam. Padahal ini yang penting,"*

**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si.,M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

# Catatan DPR Terkait Penyaluran Dana BOS

Yang cukup berat terkait assesmen dan evaluasi pembelajaran. Apabila assesmen dilakukan dengan skill guru yang minimum menjadi pekerjaan rumah sendiri. Kemudian, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Biasanya kalau disekolah *tuh* belum terpikir untuk pengembangan. Karena selama ini kan pengembangan dari LPP, kemudian dari Dinas dan segala macam. Padahal ini yang penting,"

## Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah memberikan catatan khusus terkait kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut Ledia, verifikasi sekolah menjadi suatu hak yang sangat penting dengan berbagai keterbatasan karena luasnya wilayah di Indonesia.

"Yang belum diatur di skemanya adalah, jika di tahap pertama tidak semua tersalur padahal itu menjadi hak, apa nanti dilakukan rapel ditahap kedua dan ketiga? Kasihan juga

sih ya, soalnya saya dapat laporan sekolah bahwa mereka tidak terima pertama paling krusial sekali itu awal Januari," ujar Ledia dalam diskusi polemik di Ibis Tamarin Gondangdia, Jakarta, Sabtu (15/2).

Kemudian soal pengawasan. Menurut Ledia, karena rekeningnya langsung pada sekolah, berarti pengawasannya juga harus intens.

"Kritik saya ke Mas Menteri (Nadiem Makarim)

waktu kita di DPR, anggaran Irjenya enggak nambah. Padahal dua kementerian digabung, terus dengan skema bantuan yang baru. berarti kan pengawasannya lebih intens. untuk menjaga, mengawasi dan melakukan pencermatan," jelasnya.

Ledia menyebut yang cukup berat terkait assesmen dan evaluasi pembelajaran. Apabila assesmen dilakukan dengan skill guru yang minimum menjadi pekerjaan rumah sendiri.

"Kemudian, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Biasanya kalau disekolah tuh belum terpikir untuk pengembangan. Karena selama ini kan pengembangan dari LPP, kemudian dari Dinas dan segala macam. Padahal ini yang penting," pungkasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengubah skema penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), termasuk di dalamnya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS akan langsung ditransfer ke masing-masing



sekolah yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peraturan itu diubah, dari yang sebelumnya, transfer dilakukan terlebih dulu ke pemerintah

provinsi, baru setelahnya diteruskan ke instansi sekolah.

# Pemerintah Harus Bangkitkan Ekonomi yang Stagnan

Pemerintah sudah berjanji kemudian merangkumnya dalam target RPJMN 2015 - 2019. Target pertumbuhan ekonomi, target kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka belum memenuhi target RPJMN tersebut. Jika kemudian banyak target tidak tercapai maka rakyat wajar mempertanyakan. Bukan malah sebaliknya pemerintah yang mempertanyakan rasa syukur rakyatnya sendiri, Ini kan menjadi terbalik

## H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (10/2) Pernyataan Pemerintah yang menyatakan pertumbuhan ekonomi harus disyukuri meski tidak mencapai target menuai kritik dari Anggota DPR Komisi XI, Hidayatullah.

"Bersyukur itu sudah kewajiban kita setiap hari, jadi tidak perlu diajari lagi oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah menumbuhkan ekonomi secara berkualitas dan mensejahterakan rakyat".

Menurut Legislator asal Sumantera Utara ini Pemerintah sudah berjanji kemudian merangkumnya dalam target

RPJMN 2015 - 2019. Target pertumbuhan ekonomi, target kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka belum memenuhi target RPJMN tersebut. Jika kemudian banyak target tidak tercapai maka rakyat wajar mempertanyakan.

"Bukan malah sebaliknya pemerintah yang mempertanyakan rasa syukur rakyatnya sendiri, Ini kan menjadi terbalik. Pemerintah harus bangkitkan ekonomi yang stagnan ini" kata Hidayatullah dalam rilis persnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (10/2/2020).

Dengan situasi ekonomi global yang kurang stabil saat ini, Anggota Fraksi PKS ini menyerukan agar pemerintah bekerja lebih keras dan fokus.

"Pemerintah harus kreatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Jangan situasi global selalu dijadikan alibi kegagalan mencapai target, karena situasi ekonomi global sejak dahulu pun kita sudah biasa menghadapinya. Sebenarnya pemerintah ini sanggup apa nggak sih? " pungkas Hidayatullah.



# Anis Byarwati Desak Pimpinan DPR Segera Proses Usulan Pansus Jiwasraya

Menurut saya, Wakil ketua DPR harus tetap memproses usulan pansus yang telah diajukan oleh PKS dan Demokrat. Pansus hal angket adalah hak anggota DPR. Kita mengusulkan pansus bukan berarti tidak menghargai panja yang telah dibentuk. Justru dengan pansus semua panja yang sudah dibentuk ini bisa lebur untuk bekerja lebih efisien, mampu menggali lebih dalam,

## Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (13/2). Politisi Jakarta memproses usulan Pansus Hak Angket skandal PT Asuransi Jiwasraya yang telah diajukan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Hal ini disampaikan Anis kepada awak media yang menghubunginya Kamis (13/2) malam.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan bahwa Pansus Hak Angket itu merupakan hak anggota DPR RI. "Kita

mengusulkan Pansus Hak Angket itu bukan berarti tidak menghargai Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk Komisi III, VI dan XI DPR RI. Justru dengan Pansus Hak Angket, semua Panja yang sudah dibentuk di Komisi III, VI dan XI DPR RI bisa lebur untuk bekerja lebih efisien. Mampu menggali lebih dalam, dan dapat melakukan audit investigasi sehingga semua proses yang dilakukan Pansus dapat diketahui publik" katanya. Anis menyatakan fraksi PKS menginginkan agar masalah

yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dapat diungkap sejelas-jelasnya kata Wakil Rakyat dari Dapil I Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Menurut Anis, penyelesaian skandal PT Jiwasraya yang telah merugikan keuangan negara lebih Rp 13,7 triliun tersebut harus dilakukan secara komprehensif, tidak parsial. Penyelidikan secara komprehensif itu hanya bisa dilakukan melalui Pansus Hak Angket. Ia menyebutkan bahwa saat ini, DPR masih menunggu audit investigatif yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga identifikasi masalahnya komprehensif dan multidisiplin.

Anis juga berharap agar masalah yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertanggungjawaban merah tersebut jangan direduksi dengan cara BUMN menutup dana nasabahnya saja, tetapi aktor-aktor fraudnya tidak diungkap. Ia menginginkan supervisi OJK dan Kementerian BUMN yang lemah dalam bidang pengawasan harus direform, dan juga ada target dana yg dibobol bisa kembali.



Lebih jauh, Anis menjelaskan bahwa Fraksi PKS DPR RI akan terus mengupayakan agar pimpinan DPR RI membahas usulan Pansus Hak Angket yang telah diajukan tersebut di Badan Musyawarah (Bamus) dan menjadikan usulan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat itu sebagai agenda rapat paripurna DPR RI.

Sebagaimana diketahui, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat, Selasa (4/2) telah

menemui Pimpinan DPR RI untuk mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mega skandal PT Asuransi Jiwasraya. Usulan pembentukan Pansus tersebut sudah diserahkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini kepada Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin di ruangan Pimpinan DPR RI, Lantai Tiga Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## MKD DPR Gelar Pertemuan Dengan Para Penegak Hukum Di Sumut

*Ini adalah upaya untuk menjalin komunikasi dengan penegak hukum, sehingga jika terjadi persoalan atas anggota DPR akan dapat dilakukan koordinasi dengan baik. Dengan demikian MKD akan dapat memantau jika ada anggota DPR sedang menjalani proses hukum*

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

Ketua MKD DPR RI

# MKD DPR Gelar Pertemuan Dengan Para Penegak Hukum Di Sumut

Ini adalah upaya untuk menjalin komunikasi dengan penegak hukum, sehingga jika terjadi persoalan atas anggota DPR akan dapat dilakukan koordinasi dengan baik. Dengan demikian MKD akan dapat memantau jika ada anggota DPR sedang menjalani proses hukum

## Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua MKD DPR RI

JAKARTA (Waspada) Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja di Sumatra Utara (Sumut) dan menggelar pertemuan dengan para penegak hukum. Ketua DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan dan Ketua Fraksi- fraksi, serta Akademisi di Poldasu.

Ini adalah upaya untuk menjalin komunikasi dengan penegak hukum, sehingga jika terjadi persoalan atas anggota DPR akan dapat dilakukan koordinasi dengan baik. Dengan demikian MKD akan dapat memantau jika ada anggota DPR sedang menjalani proses

hukum, ujar

Ketua MKD DPR, Aboebakar Alhabsyi dalam relisnya yang diterima wartawan di Jakarta.

Dia menjelaskan agenda utama MKD DPR kunker ke Sumut adalah meminta masukan terkait adanya rencana penyempurnaan kode etik dan perbaikan tata cara beracara di MKD.

Sebelumnya kita telah berikan draft kode etik dan draft tata beracara di MKD kepada para penegak hukum dan akademisi Ketua DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan

dan Ketua Fraksi- fraksi serta Akademisi di Sumut, jelasnya.

Setelah bahan tersebut dipelajari, tambah Aboebakar, MKD DPR berharap akan mendapat masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Ada beberapa perubahan pada kode etik sebagai upaya menyempurnakan aturan yang telah ada, misalkan saja pada persoalan independensi kita hendak meningkatkan independensi, baik untuk mereka anggota MKD maupun anggota DPR pada umumnya, tukasnya

Selain itu mengenai isu pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, kita merancang agar Anggota DPR RI dilarang terlibat dalam kegiatan iklan, film atau sinetron yang bersifat komersial.

‘ Saya mengapresiasi respons positif dari Poldasu Sumut yang secara baik telah menyiapkan acara ini. Termasuk untuk para Ketua DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan dan Ketua Fraksi- fraksi serta Akademisi yang telah berkenan memberikan masukan dan



saran” akunya.

Tentunya, lanjut Aboebakar, semua yang disampaikan akan dicatat dengan baik, ditampung dan didiskusikan untuk menyempurnakan draft yang

sudah ada.

“ Ini semua tentunya ditujukan untuk mendukung dan menguatkan kinerja MKD kedepan,” pungkas Aboebakar (aya)

# BURT Dorong Gerakan Higienis di Kompleks Parlemen

Ke depan kita dorong Yankes melengkapi peralatan medisnya lebih baik dan modern untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi Anggota Dewan dan juga karyawan di DPR pada umumnya

**Dr. H. R.A. Dimiyati Natakusumah, SH,MH**

Wakil Ketua BURT DPR RI

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mendorong gerakan higienis sebagai upaya pencegahan virus menular, khususnya di tengah merebaknya virus Corona. Menurutnya, perlu disiapkan titik-titik untuk mendapatkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di Kompleks Parlemen.

"Alkohol gel untuk pembersih tangan di setiap pintu masuk ruang rapat komisi, ruang AKD, pintu masuk lift sebagai upaya menjadikan lingkungan DPR RI sebagai area yang higienis," saran Dimiyati usai memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau fasilitas RS Awal Bros Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).

Hal tersebut, imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit melalui sentuhan, seperti berjabat tangan, mengucek mata dan sebagainya. Sehingga kebersihan tangan benar-benar harus dijaga.

"Kita perlu mencontoh sistem higienitas seperti yang diterapkan pengelola Rumah Sakit Awal Bros yang menempatkan botol-botol hand sanitizer (pembersih tangan) di setiap pintu lift dan ruang-ruang perawatan. Saya kira hal semacam ini akan membantu mencegah penularan penyakit dan perlu diterapkan di lingkungan DPR," yakin Dimiyati.

Legislator dapil Banten I ini juga berharap klinik Pelayanan

Kesehatan (Yankes) DPR RI ke depan juga terus meningkatkan pelayanan dan peralatannya.

"Ke depan kita dorong Yankes melengkapi peralatan medisnya lebih baik dan modern untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi Anggota Dewan dan juga karyawan di DPR pada umumnya," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BURT DPR RI Ida Syahidah Rusli Habibie. Menurutnya penerapan pembersih tangan diberbagai sudut gedung DPR RI juga demi kenyamanan para Anggota Dewan, karyawan dan tamu. Menurutnya, setiap Anggota Dewan maupun pegawai harus membiasakan budaya hidup sehat, termasuk di lingkungan kerja.

"Imbauan untuk tidak merokok di sembarang tempat di Gedung DPR juga harus digalakkan. Tidak boleh lagi ada yang merokok di luar smoking area tanpa terkecuali," pesan politisi Partai Golkar ini sembari mengimbau kepada para Anggota Dewan untuk mendukung upaya menciptakan suasana gedung DPR lebih sehat dengan bebas asap rokok. (oji/sf)



# Pelaksanaan Dana Otsus Mengecewakan

Tampaknya memang ada hal yang mengecewakan dari pelaksanaan Dana Otsus dan keistimewaan dengan target-target pembangunan yang diinginkan. Tidak semata-mata sebagai penyaluran dana tetapi sebagai cost politik dalam proses-proses yang melatarbelakanginya. Sehingga bagaimana pun juga menjelang masa-masa akhir perlu ada exit strateginya seperti apa,”

## H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhulmuhammad menilai paparan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rapat kerja dengan BAKN bisa menjadi pelengkap dari gambaran-gambaran perjalanan yang dilakukan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke beberapa daerah.

“Tampaknya memang ada hal yang mengecewakan dari pelaksanaan Dana Otsus dan keistimewaan dengan target-target pembangunan yang diinginkan. Tidak semata-mata sebagai penyaluran dana tetapi

sebagai cost politik dalam proses-proses yang melatarbelakanginya. Sehingga bagaimana pun juga menjelang masa-masa akhir perlu ada exit strateginya seperti apa,” ucap Syaikhulmuhammad di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, sambungnya, BAKN menangkap bahwa selama ini tidak ada masterplan yang jelas terhadap proses pembangunan. Terkait dengan mekanisme penyaluran dananya, seringkali terjadi keterlambatan. Bahkan di Aceh

dana SILPA nya mencapai angka Rp 1 triliun.

“Ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan untuk percepatan pembangunan, maupun dalam hal mengentaskan berbagai permasalahan yang ada. Ke depan perlu dirumuskan formulasi-formulasi dan insentif apa yang kiranya perlu dimunculkan sebagai alternatif,” ujarnya. (dep/es)

Foto :  
dpr.go.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***Sambut Baik Rencana Bandara J.B. Soedirman Purbalingga Dipakai Mudik Lebaran***

*Rencana beroperasinya Bandara J.B. Soedirman untuk mudik lebaran tentu adalah kabar baik bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya yang akan mudik ke kampung halaman. Bandara ini akan menjadi salah satu alternatif moda transportasi para pemudik selain menggunakan angkutan darat."*

**H. Rofik Hananto, S.E**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jateng VII

# Rofik Sambut Baik Rencana Bandara J.B. Soedirman Purbalingga untuk Mudik Lebaran

rencana beroperasinya Bandara J.B. Soedirman untuk mudik lebaran tentu adalah kabar baik bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya yang akan mudik ke kampung halaman. "Bandara ini akan menjadi salah satu alternatif moda transportasi para pemudik selain menggunakan angkutan darat

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Jakarta (12/02) Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Jawa Tengah VII H. Rofik Hananto, S.E. menyambut baik rencana beroperasinya Bandara Jendral Besar Soedirman - Purbalingga untuk Mudik Lebaran pada bulan Mei 2020 mendatang.

Diikuti di Komplek Gedung DPR RI, Rofik mengatakan bahwa rencana beroperasinya Bandara J.B. Soedirman untuk mudik lebaran tentu adalah kabar baik bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya yang akan mudik ke

kampung halaman. "Bandara ini akan menjadi salah satu alternatif moda transportasi para pemudik selain menggunakan angkutan darat." jelas Rofik, Rabu (12/2)

Kabar akan digunakannya Bandara J.B. Soedirman disampaikan oleh Direktur Utama PT. Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin saat audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (06/02). "Kami akan gunakan Bandara J.B. Soedirman untuk angkutan lebaran pada bulan Mei 2020. Tentunya setelah

mendapat izin dari Regulator, yakni Kementerian Perhubungan." Kata Awaluddin

Saat ini progres pembangunan runway dan apron Bandara J.B. Soedirman sudah mencapai 42 persen, ditargetkan pembangunan akan rampung akhir April 2020. Oleh karena itu, bandara dapat beroperasi secara terbatas untuk angkutan lebaran 2020 dengan memanfaatkan gedung terminal Landasan Udara yang saat ini sudah ada.

Awaludin menerangkan bahwa panjang runway Bandara J.B. Soedirman mencapai 1.600 meter, dengan begitu landasan sudah dapat digunakan untuk mendarat pesawat Jenis ATR72-600, dengan tipe pesawat ini maka rute penerbangan bisa mencakup seluruh Pulau Jawa, Bali, sebagian Sumatera dan Kalimantan.

Selain pembangunan Runway dan Apron yang terus dikebut, pembangunan gedung terminal seluas 3600 M2 juga ditargetkan akan selesai akhir September 2020 dan diperkirakan dapat menampung 250.000-300.000 penumpang per tahun. Jadi, awal Oktober bandara dapat berfungsi secara



optimal.

Rofik mengingatkan, agar proses pembangunan Bandara J.B. Soedirman tidak mengabaikan kualitas proyek pembangunan, dan meminta agar nantinya bandara beroperasi secara optimal, sarana pendukung seperti transportasi darat, hotel, tempat kuliner, tempat wisata dan sarana pendukung lainnya juga harus disiapkan dengan matang.

"Saat ini proses pembangunan Bandara J.B. Soedirman terus dikebut, saya mengingatkan agar proses pembangunan bandara ini tidak mengabaikan kualitas proyek

bangunan bandara, jangan sampai setelah beroperasi, bangunan yang sudah dibangun tidak berumur panjang atau cepat rusak. saya juga mengingatkan agar bandara beroperasi secara optimal, sarana pendukung seperti transportasi darat, hotel, tempat kuliner, tempat wisata dan sarana pendukung lainnya juga harus disiapkan dengan matang." Tutur Anggota DPR RI kelahiran Purbalingga ini.

Diharapkan dengan beroperasinya Bandara J.B. Soedirman ini, perekonomian di daerah Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya akan bangkit.

# PKS Tangerang Selatan Giat Rekrut Kader Baru

Orientasi ini dilaksanakan secara sistematis, berkala dan terprogram. Dalam orientasi partai ini setiap kader dan pengurus diingatkan lagi pada ideologi partai, konsepsi perjuangan partai dan pelatihan peningkatan pengelolaan manajemen partai

**Dr. H. MULYANTO,  
M.Eng**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Banten III

Kota Tangsel, (9/2) Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Tangerang Selatan selenggarakan Training Orientasi Partai (TOP), di Afiat Futsal, Pamulang, Tangerang Selatan, Ahad (9/2).

Acara bertema Sekolah Cinta Indonesia ini dihadiri seluruh pengurus DPD PKS, anggota DPR RI FPKS, DPRD FPKS dan bakal calon Walikota Tangerang Selatan, Ruhama Ben. Acara rekrutmen kader PKS ini diikuti 150 peserta dari berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya anggota DPR-RI dari FPKS Mulyanto mengajak peserta untuk mengenal PKS secara utuh. Menurut Mulyanto PKS adalah partai dakwah yang terbuka konsisten menjaga amanah dan aspirasi masyarakat baik ditingkat pusat, provinsi maupun di kota dan kabupaten.

Setiap pengurus dan pejabat di PKS sangat patuh pada ketentuan partai. Apapun yang ditetapkan partai akan menjadi acuan bagi kader dan pengurus partai dalam mengambil tindakan. Sikap patuh ini menjadi modal dasar terciptanya soliditas yang



menjadi ciri khas PKS.

"Sikap patuh pada aturan partai ini tidak terbangun dengan sendirinya. Tapi merupakan hasil kegiatan orientasi partai yang rutin kita laksanakan. Orientasi ini dilaksanakan secara sistematis, berkala dan terprogram. Dalam orientasi partai ini setiap kader dan pengurus diingatkan lagi pada ideologi partai, konsepsi perjuangan partai dan pelatihan

peningkatan pengelolaan manajemen partai," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sebagai partai kader, PKS dikelola secara bersama-sama oleh kader, bukan hanya tergantung pada figur atau tokoh tertentu, sebagaimana yang terjadi di partai lain. Dengan cara seperti ini maka setiap kader merasa memiliki dan bertanggungjawab

terhadap kemajuan partai.

"Jadi siapapun punya kesempatan yang sama untuk maju bersama partai. Asalkan konsisten dan komitmen terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh partai," tegas sekretaris Majelis Pertimbangan Partai ini.

# Nur Azizah Tamhid: Peran Strategis orangtua dalam mendidik Anak

Peran aktif orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik anak dan membentengi mereka dari perbuatan negatif tersebut. Orang tua perlu mengajarkan anak kegiatan aktif berbasis religius seperti mengaji dan Sholat 5 Waktu.

## HJ. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Jakarta (14/2) Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid menghadiri Diskusi Parenting dengan Tema Melindungi Anak Dari Bahaya Gadget bertempat di Jatisampurna, Bekasi.

Dalam sambutannya Hj. Nur Azizah Tamhid, BA. MA. sampaikan bahaya dan dampak negatif kecanduan gadget dan menonton film porno. "Film porno sangat berdampak negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak" jelas Nur Azizah.

Menurut Nur Azizah, peran aktif orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik anak dan membentengi mereka dari perbuatan negatif tersebut.

"Orang tua perlu mengajarkan anak kegiatan aktif berbasis religius seperti mengaji & Sholat 5 Waktu. Saat waktu solat tiba, ajak anak-anak berjamaah di Masjid" ujar Nur Azizah dalam acara Diskusi Parenting dengan Tema Melindungi Anak Dari Bahaya Gadget bertempat di Kediaman Ibu Lita-Bpk Imin Gang Gempora RT 02/04 No. 13 Jatiranggon Jatisampurna Bekasi, Jum'at, 14 Februari 2020

Politisi perempuan PKS dari Dapil Jabar VI berpendapat bahwa kesuksesan pendidikan anak terdiri dari 3 unsur yakni peran orang tua, pemerintah

dan masyarakat. "Jika ketiga hal tersebut berjalan dengan baik maka insya Allah, pendidikan anak akan sukses" kata Nur Azizah.

Nur Azizah juga menekankan bahwa masa depan bangsa dan negara amat bergantung pada pendidikan anak "Suksesnya pendidikan anak-anak insya Allah menjadi suksesnya masa depan bangsa dan negara" pungkash Nur Azizah. dalam acara yang dihadiri

Beliau juga berpesan bahwa urusan ini harus dipegang oleh ahlinya. Jika tidak, kehancuran akan datang





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***Peran Ulama dan Umat Islam Sangat Besar Bagi Bangsa Ini***

*Ulama dan umat Islam memiliki peran besar terhadap bangsa ini sehingga jangan dituduh radikal, mereka dulu berjuang di garda terdepan kemerdekaan. Resolusi jihad itu salah satu buktinya*

**Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.**

*Wakil Ketua MPR RI*

# HNW: Peran Ulama dan Umat Islam Sangat Besar Bagi Bangsa Ini

Ulama dan umat Islam memiliki peran besar terhadap bangsa ini sehingga jangan dituduh radikal, mereka dulu berjuang di garda terdepan kemerdekaan. Resolusi jihad itu salah satu buktinya

## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Wakil Ketua MPR RI

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan ulama dan umat Islam memiliki peran yang besar terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian HNW berharap jangan sampai bangsa ini mengalami islamophobia karena mengira umat Islam tidak punya jasa pada Indonesia, sehingga mereka dituduh dan dipojokkan.

"Ulama dan umat Islam memiliki peran besar terhadap bangsa ini sehingga jangan dituduh radikal, mereka dulu berjuang di garda terdepan kemerdekaan. Resolusi jihad itu salah satu buktinya" ujar HNW

dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020).

HNW juga memaparkan peran ulama dan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Meski ulama dan umat Islam bukan satu-satunya yang berjuang membentuk NKRI tapi peran besar mereka tidak bisa diabaikan begitu saja." ujarnya saat acara sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di kawasan Kampung Johar Baru di Jakarta kemarin.

HNW juga menegaskan agar umat Islam tidak anti terhadap demokrasi yang ada di

Indonesia. "Pancasila memberi kesempatan kepada semua untuk menghadirkan kehidupan beragama", tegasnya.

Apa yang disampaikan oleh HNW memberi kesadaran masyarakat akan peran ulama dalam sejarah perjuangan bangsa sehingga peserta sosialisasi takjub atas besarnya peran ulama dalam ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia bahkan para ulama rela menerima konsensus bersama untuk menjadikan Sila I Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satunya adalah seorang peserta sosialisasi, Rukdiati, ia menyampaikan kini lebih mengerti peran besar ulama dalam pembentukan NKRI. Ia merasa selama ini peran ulama cenderung tidak dimunculkan dalam buku-buku sejarah.

"Pak Hidayat menyampaikan kepada kami bahwa tidak cukup dengan Jas Merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah), tapi juga



Jas Hijau (jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama)," tuturnya.

Peserta lainnya, Melly Wijaya, dari Kelurahan Tanah Tinggi, menyatakan kekhawatirannya akan anak-anak jaman sekarang yang mungkin sudah lupa dengan sejarah. Oleh karena itu ia

merasa Sosialisasi 4 Pilar dapat memahamkan kembali proses perjalanan bangsa hingga terbentuknya NKRI, termasuk peran besar ulama di dalamnya.

"Dari pemaparan Pak Hidayat, saya menjadi paham bahwa terbentuknya NKRI tidak lepas atas perjuangan ulama dan umat Islam," pungkasnya

## Sosialisasi 4 Pilar MPRI RI

# Pemuda Perlu Memperkuat Semangat Cinta Negeri Bela Bangsa

wawasan kebangsaan tidak hanya sebatas melihat kembali sejarah atau memaknai kata. Lebih dari itu, nilai ideologi ini harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari

### Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Fraksi PKS MPR RI

Para pemuda harus membekali diri dengan kemampuan di berbagai bidang keilmuan termasuk teknologi. Namun, semua itu tidak akan lengkap tanpa penguatan nilai religius dan kebangsaan.

Hal itu disampaikan anggota MPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, saat melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar MPRI RI di

Hotel Mercure Bandung, Minggu 9 Februari 2020. Kegiatan tersebut diikuti pegiat Komunitas Senam Nusantara, pegiat Relawan Indonesia, dan aktivis Ormas Kepemudaan Kepanduan di Kota Bandung.

Menurutnya, wawasan kebangsaan tidak hanya sebatas melihat kembali sejarah atau memaknai kata. Lebih dari itu, nilai ideologi ini harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

la mengingatkan kepada para peserta yang didominasi pemuda terkait peluang, tantangan, sekaligus ancaman masa depan bangsa Indonesia. Ketika langkah dan lemah dalam nilai kebangsaan, maka anak muda hanya akan bisa melihat sebatas perubahan kekuasaan.

“Dikuasai secara teknologi, secara ekonomi, bahkan mungkin secara fisik alam yang dikeruk dan dihabiskan. Di sinilah peran pemuda sebagai pelopor pembela bangsa dan negara diperlukan dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai religius dan, nilai-nilai kebangsaan,” paparnya.



Menurut dia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pada tujuan kebaikan atau keburukannya bergantung pada manusianya. Nilai religius dan kebangsaan yang kuat tentu akan mengarahkan semua keahlian yang dimiliki pada tujuan bernegara sesuai arahan para founding fathers dan para pahlawan negeri ini.

“Dengan demikian bangsa Indonesia bisa maju dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokalnya,” ujarnya.

Melekatkan nilai-nilai

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam implementasi keseharian bisa berbeda cara dalam setiap masa dan generasi. Caranya tidak lagi dengan mengangkat senjata seperti jaman penjajahan dulu.

Implementasi yang dapat dilakukan, di antaranya mencintai produk Indonesia, mengutamakan belanja dari UMKM Indonesia, mendukung perkembangan produk kreatif lokal, bersemangat mengunjungi dan merawat destinasi wisata dalam negeri,

menggerakkan komunitas-komunitas kebersamaan, termasuk menghilangkan bibit-bibit perpecahan bangsa yang kerap dimulai dari lintasan pesan media sosial.

“Sepertinya sederhana, tetapi justru itu adalah salah satu upaya yang bisa mulai dilakukan para pemuda untuk menumbuhkan semangat bela bangsa, bela negara, dengan bersatu dan bergerak bersama-sama mencintai negeri ini,” pungkasnya.

# Alifuddin Tanamkan Empat Pilar Bangsa di Kubu Raya

Bagaimana amanah dari MPR saat kami dilantik pertama kali, kami berkewajiban menyampaikan empat pilar tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus sampai ke masyarakat

## H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M.

Anggota Fraksi PKS MPR RI

Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Kalbar 1, H Alifuddin kembali menanamkan dan mengingatkan pentingnya empat pilar kebangsaan. Hal ini ditegaskannya saat memberikan sosialisasi empat pilar pada masyarakat di kompleks Mawar, Jalan Sungai Raya Dalam, Kubu Raya, Sabtu (08/02).

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi empat pilar MPR ini merupakan tugas dan kewajiban dari Anggota MPR RI.

Hal ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No.42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c;

Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf c;

Hingga INPRES No.6 Tahun 2005 tentang Dukungan kelancaran pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR.

"Bagaimana amanah dari MPR saat kami dilantik pertama kali, kami berkewajiban menyampaikan empat pilar tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus sampai ke masyarakat," katanya.

Diterangkan Alif, jika Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945

sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

"Khususnya ideologi Pancasila bagi kita umat Islam, kader-kader PKS agar paham tidak ada pertentangan, bahwa yang mengatakan PKS anti Pancasila tentu sangat salah besar, tentu penggagas Pancasila para ulama, orang-orang top di saat itu, di antaranya pendiri NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, mereka adalah pendiri bangsa, baik dari kalangan nasionalis, muslim, semuanya tergambar di sana, jadi tidak ada pertentangan," paparnya.

Anggota komisi 9 DPR RI ini pun menegaskan, jika kader dan konstituen PKS menjadi terdepan untuk membela Pancasila.

"Insy Allah kami akan menjadi yang terdepan untuk membela Pancasila, dikala orang mengatakan PKS tidak Pancasila, kitalah mengatakan perbuatan, tidak



perlu banyak bicara, dengan perbuatan, kita pendukung Pancasila paling utama," tegasnya.

Alifuddin pun berharap kepada konstituen PKS, agar mengamalkan nilai-nilai Islam sama dengan mengamalkan Pancasila.

"Yang jelas dalam negara

ini TAP MPRS belum dicabut, paham komunis tidak boleh berkembang, pesan kami kepada masyarakat, NKRI harga mati, dengan kita tetap mempertahankan NKRI, Insyallah kita akan kokoh," pungkas Alif.



KOMISI IX

## Tinjau Pengembangan Obat Asli Indonesia dan Pengawasannya

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar dan Kurniasih Mufidayati beserta Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk mengetahui pengembangan obat asli Indonesia dan pengawasannya, Kamis, 13 Februari 2020. [news/foto : dpr.go.id](http://news/foto : dpr.go.id)

KOMISI V

## Tinjau Jalan 4 Jalur Pekanbaru Bengkinang

Anggota Komisi V DPR RI H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Riau dalam rangka meninjau jalan 4 jalur Pekanbaru-Bengkinang, Kamis, 13 Februari 2020. Komisi V DPR RI berharap, pembangunan jalur ini dapat segera diselesaikan, mengingat kepadatan arus lalu lintas di area ini butuh jalan yang memadai. [News/Foto : dpr.go.id](http://News/Foto : dpr.go.id)

KOMISI II

## Rapat dengan Kepala Kanwil BPN NTB

Anggota Komisi II Dr. H. Mardani, M.Eng. bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI menggelar pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta jajarannya, dalam rangka membahas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang Wilayah, di Kantor BPN Kota Mataram, Provinsi NTB, Kamis, 13 Februari 2020

[News/Foto : dpr.go.id](http://News/Foto : dpr.go.id)



DAPIL

## Diskusi Parenting Bahaya Gadget

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI (Depok-Bekasi) Hj. Nur Azizah Tamhid, BA.MA. turut hadir dalam diskusi Parenting bertema "Melindungi Anak Dari Bahaya Gadget". Kegiatan dilaksanakan dalam rangka agenda kunjungan daerah pemilihan (kundangpil) bertempat di Kediaman Ibu Lita Bpk Imin, warga Gang Gempora RT 0204 No 13 Jatiranggan Jatisampurna Bekasi, Jum'at, 14 Februari 2020



DAPIL

## Sarapan bareng Lurah Camat Pondok Pinang

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. melakukan makan pagi di kediamannya pada Sabtu 15 Februari 2020. hadir dalam acara ini Lurah Pondok Pinang Rizki Januar, S.STP dan Camat Pondok Pinang Drs. H. Aroman M.Si. hadir pula beberapa tokoh tingkat RW dan RT setempat. Dalam acara ini Kurniasih mendukung kegiatan pendataan ketuk pintu melalui program carik guna melengkapi data warga Jakarta



KOMISI V

## Tinjau Pesawat N219 dan Drone PUNA MALE

Saadiah Uluputty, S.T. bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pesawat N219 dan Drone PUNA MALE yang diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2020. #KunkerDPR

Foto/berita : dpr.go.id



## Kunjungan SMPIT Al-Hikmah Kota Depok

Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan dari SMPIT Al-Hikmah, Kota Depok pada Jum'at 14 Februari 2020 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR kepada para pelajar serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

## Aspirasi korban First Travel

Anggota Komisi VIII DPR Hj. Nur Azizah Tamhid, BA, MA menerima penggugat/ korban First travel di ruang rapat Pimpinan Fraksi pada Selasa 11 Februari 2020. aspirasi terkait nasib para jamaah first travel Pasca Putusan Mahkamah Agung.

## Kunjungan Bidpuan PKS Bandung Barat

Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil Jabar Ledia Hanifa, Netty Prasetyiani dan Adang Sudrajat menerima langsung para ibu dari Bidang Perempuan DPD PKS Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 11 Februari 2020. Bertempat di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

## PROFIL

## H. ANSORY SIREGAR, Lc,



**K**ali ini kita akan berbagi cerita mengenai seorang Aleg yang suaranya "berat", tapi lantang. Sikapnya tegas, namun lembut hatinya. Sekilas sosoknya terlihat kaku, padahal aslinya hangat. Ada yang bilang ibarat kiasan kalimat "Tampang Gajah Mada, Hati Rosalinda". Macam Kali itu mak !

Pria kelahiran Bangunpurba, 10 Juni 1965, Namanya H. Ansory Siregar, Lc. Saat ini didapat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi perkara kesehatan dan tenaga kerja, termasuk yang lagi hangat tentang "BPJS". Beliau maju sebagai Anggota Legislatif mewakili Sumatra Utara daerah pemilihan III. Ini Medan Bung...!!

Ansory Siregar tak hanya dikenal sebagai seorang politikus dan "Singa Parlemen", lulusan Universitas Damaskus Syria ini diketahui juga berprofesi sebagai Dosen di STAI Al Hikmah, dan staf Islamic Center Holland.

”  
**Keluarga bahagia,  
 masyarakat bahagia,  
 Indonesia Bahagia”**

Suami dari Anita Zahdrah dan dikaruniai dua anak. Membagi waktu untuk anak dan menjadi ayah memang tidaklah mudah bagi Ansory Siregar, karenanya beliau berusaha membangun komunikasi yang positif dengan anak-anak. Sebagai Ayah, Ansory juga dikenal sangat sayang kepada isteri dan

anak-anaknya. Ansory punya hobby bere-nang dan sejumlah kesibukan lain, diantaranya dakwah yang tanpa henti. Pesan untuk keluarga Indonesia: "Keluarga bahagia, masyarakat bahagia, Indonesia Bahagia"

Keluarga Bahagia  
**BANGAPUN  
 BAHAGIA**

### SOCMED

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen H Ansory Siregar, Lc dapat mengikuti social media:

**Facebook**  
**Twitter**  
**Instagram**  
**Website**

Kawan Ustadz Ansory Siregar DPR RI  
 @ansorysiregar  
 kawanustadzansorysiregardprri  
 ansorysiregar.com



Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI